

# **RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023**



**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

## RINGKASAN

. Dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah masalah utama yang kita hadapi dalam 5 tahun kedepan adalah tingginya angka pengangguran yang ditunjukkan oleh angka TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) yang didominasi oleh lulusan SMA / SMK dan Universitas (penganggur muda terdidik usia 15 – 24 tahun). Diperlukan upaya penanganan pengangguran baik melalui perluasan kesempatan kerja maupun peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja serta mengupayakan hubungan industrial yang harmonis guna meminimalisasi PHK. Upaya pengurangan pengangguran harus terintegrasi dengan pembangunan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru, dan yang kemudian aspek-aspek produktif tersebut mampu menjamin keberlanjutan terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja. Penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat istiadat masyarakat.

Penyusunan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah yang akuntabel, terfokus, dan berorientasi pada pencapaian kinerja utama (outcome impact) merupakan suatu upaya pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengatasi permasalahan tersebut.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas ridho dan karunia-Nya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 sebagaimana mestinya.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah secara berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan agar pencapaian outcome maupun output Indikator Kinerja Daerah maupun IKU PD serta program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai secara efektif.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Tengah merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan bagian dari kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun yang dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023, mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja perubahan ini pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Akhirnya, semoga Rencana Kerja Perubahan ini dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman dalam mengoperasionalkan seluruh program/kegiatan dalam rangka pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian untuk mewujudkan masyarakat Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera dan lebih maju.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Provinsi Sulawesi Tengah



**Drs. ARNOLD FIRDAUS, MT**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 196511251994031007**

## DAFTAR ISI

RINGKASAN .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	2
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penyusunan.....	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU .....	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	26
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	26
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	43
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	51
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....	51
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	57
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	73
BAB V PENUTUP .....	93
LAMPIRAN POHON KINERJA DAN CASCADING KINERJA TAHUN 2023 .....	94

PENDAHULUAN

BAB 1

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023 merupakan reviu besaran target kinerja capaian Indikator kinerja Daerah, Indikator kinerja Utama Perangkat Daerah serta Indikator kinerja Program dan Kegiatan perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja Perubahan disusun untuk mengefektifkan pencapaian target kinerja tahunan yang memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian, strategi, program, kegiatan pencapaian Renstra dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Renstra secara khusus harus dijadikan acuan sepenuhnya untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan adanya tuntutan reformasi dan otonomi daerah, maka pembangunan daerah diarahkan pada beberapa kebijaksanaan pembangunan yang menggambarkan perubahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pengelolaan pembiayaan, melalui penataan kembali kelembagaan pemerintahan dan aparat daerah yang lebih profesional dalam mengemban tugas dan fungsinya, sehingga terwujud penyelenggaraan pembangunan yang demokratis sebagaimana diamanatkan dalam visi dan misi pembangunan. Sejalan dengan kebijaksanaan Pembangunan Otonomi Daerah maka penanganan masalah Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian dapat lebih intensif sehingga peran serta masyarakat dibidang Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian dapat ditingkatkan guna mendukung suksesnya pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah, secara substantif tidak berdiri sendiri. Dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan. Oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah memperhatikan dan mensinergikan dengan RPJM Kementerian Tenaga

Kerja RI dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

Untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia khususnya Provinsi Sulawesi Tengah disegala bidang melalui upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembangunan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian sebagaimana dituangkan dalam visi dan Misi Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu : Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju. Visi tersebut dikedepankan sebagai upaya untuk menjadikan Sulawesi Tengah yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan, sebagai dasar tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan sekarang maupun yang akan datang, yang dirumuskan dalam 9 (Sembilan) Misi yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.
3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.Peningkatan Reformasi Birokrasi, Penegakan Supermasi Hukum dan HAM.
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.
5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.
6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.
7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi SulawesiTengah dan di luar Provinsi bertetangga.
8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital.
9. Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

Dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah tersebut dapat digambarkan peran dan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah melalui Pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan bidang ketransmigrasian,

yaitu Meningkatkan angka pencari kerja terdaftar yang bekerja melalui peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan perlindungan pekerja, Menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan warga unit pemukiman transmigrasi (UPT) Bina melalui peningkatan nilai pendapatan masyarakat unit pemukiman transmigrasi (UPT) Bina. Oleh karena itu dibutuhkan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang nyata dan terukur dalam rangka peningkatan penempatan dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan penduduk khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Ketransmigrasian;
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagaKerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
7. Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050 - 5889 tahun 2021 tentang Hasil Ferifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025



(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Nomor 06);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor );
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 61 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah.
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **Maksud ;**

Adapun maksud penyusunan Rencana Kerja adalah :

1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023;
2. Mengarahkan sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan prioritas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menunjang pencapaian visi misi Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah.

#### **Tujuan :**

1. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah dengan tetap memperhatikan RKPD Tahun 2023;
2. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 yang mengacu pada Renstra dan RKPD.
3. Sebagai masukan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya.

### **1.4. Sistematika Penyusunan**

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

- 1.2. Landasan Hukum
  - 1.3. Maksud dan Tujuan
  - 1.4. Sistematika Penyusunan
- BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
  - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
  - 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
  - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
  - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

EVALUASI  
PELAKSANAAN  
RENJA TAHUN LALU

BAB 2

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2022.

##### Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dampak (impact) dan indikator-indikator lainnya dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan sebagainya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

##### Capaian dan Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2022

Pada Tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah menerima anggaran sebesar Rp. **16.126.540.936,-** yang dialokasikan untuk pelaksanaan 12 program dan 45 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp **15.945.491.650,-** dengan capaian kinerja fisik sebesar **100** % dan capaian kinerja keuangan sebesar **98,88** % untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

No. Ref. Renstra	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Target Anggaran(Rp)
1.	Terlaksananya Pelatihan berbasis Kompetensi dan pelatihan kewirausahaan.	Persentase dari Jumlah Tenaga Kerja yang Dilatih dengan Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar	50 %	500.000.000,- (BIDANG)
		Persentase dari jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan jumlah tenaga kerja yang terdaftar	50 %	366.800.000,- (BLK)
		Persentase transmigran yang mendapat pelatihan dengan jumlah KK Binaan	45 %	0,- (UPT P2T)

2.	Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Tentang Arti Pentingnya Produktivitas	Persentase dari Jumlah Tenaga Kerja yang Dilatih dengan Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar	72 %	438.370.000,-
3.	Terciptanya pelayanan penempatan tenaga kerja dan fasilitasi penempatan tenaga kerja	Persentase dari jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan dengan jumlah pencari kerja yang Terdaftar	50 %	2.789.150.000,-
4.	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan dan pengujian fasilitas sarana prasarana yang layak uji dalam perusahaan	Persentase dari Perusahaan yang diperiksa dengan Perusahaan yang terdaftar. Persentase dari jumlah kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama dengan jumlah Kasus yang dicatatkan	72 %       90 %	1.625.358.250,-       1.103.100.000,-

5.	Tercapainya Peningkatan Kesempatan kerja bagi Masyarakat /Pencari kerja ke luar Negeri Sesuai Peraturan dan Prosedur	Persentase dari jumlah TK legal yang ditempatkan dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar	93 %	126.220.000,-
6.	Terbangunnya wilayah pengembangan transmigrasi dan lokasi pemukiman transmigrasi serta terfasilitasinya perindahan dan penempatan keluarga transmigrasi	Persentase dari Jumlah KK warga Transmigran yang ditempatkan dengan jumlah total KK calon Trans yang direncanakan untuk ditempatkan.	80 %	1.789.486.000,-
7.	Meningkatkan Kesejahteraan Transmigran	Persentase dari Jumlah KK Transmigran yang menetap dengan jumlah KK trans yang sudah ditempatkan.	90 %	1.259.511.000,-
8.	Meningkatkan Akses Sarana Prasarana di daerah Tertinggal	Persentase dari Kabupaten/ Kota tidak tertinggal.	62 %	192.396.000,-

## Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2022

Untuk tahun berjalan yakni anggaran tahun 2022 dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp. **16.126.540.936,-** dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 21.530.376.736,- untuk belanja langsung terdiri dari 12 program dan 38 kegiatan, direncanakan capaian kinerja fisik dan keuangan mencapai 100%, dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi anggaran.

Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 maupun perkiraan capaian tahun 2021, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

Perencanaan program/kegiatan masih berorientasi terhadap output bukan outcome, sehingga pelaksanaan evaluasi belum optimal.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pencapaian indikator kinerja maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak didukung dengan sistem kerja stakeholder pendukung, sehingga tidak sedikit pekerjaan yang diselesaikan melebihi target waktu yang ditentukan.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga beberapa kegiatan mengalami keterlambatan realisasi (tidak sesuai dengan target perencanaan awal).

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Disnakertrans Provinsi Sulawesi Tengah dan Pencapaian Rencana Strategis/Renstra Disnakertrans Provinsi Sulawesi Tengah 2016 s/d Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.



TABEL 2.1 (FORMULIR T.C.29)  
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH I  
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n - 3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (n - 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2022) (tahun n - 1)		Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2022) (tahun n - 1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2021 (n - 1)				
															Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022 (n - 1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
<b>DINAS</b>																		
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	43.796.491.685,65	27.981.075.653,00	5.209.713.214,0	4.807.738.274,0	92,28	3.535.177.080,0	2.378.522.730,0	36.323.991.007,00	82,94							
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah																73,00
2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah yang tersusun	4.000.275.229,00	1.969.105.780,00	1.189.119.714,00	486.445.550,00	40,91	375.000.000,00	180.822.401,00	2.830.551.330,00	70,76							
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan penatalaksanaan keuangan perangkat daerah	3.233.414.958,00	1.169.876.554,00	278.662.500,00	134.104.504,00	48,12	305.000.000,00	127.228.500,00	1.608.981.058,00	49,76							
2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.356.125.033,00	879.165.829,00	207.060.000,00	100.000.000,00	48,30		44.835.000,00	979.165.829,00	72,20							
2.07.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah / besaran rencana pendapatan daerah pada perangkat daerah	0,00	0,00														
2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi dan ketatausahaan kepegawaian perangkat daerah	692.830.547,00	421.357.650,00	75.000.000,00	43.615.375,00	58,15	61.862.000,00	12.462.500,00	526.835.025,00	76,04							
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan layanan administrasi umum perangkat daerah	5.168.749.500,00	3.458.532.113,00	769.344.000,00	972.018.518,00	126,34	2.793.315.080,0	333.253.860,00	7.223.865.711,00	139,76							
2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	26.198.414.489	18.418.639.389,00	2.225.589.000	3.071.554.327,0	138,01		1.206.267.500,0	21.490.193.716,00	82,03							
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	0,00	0,00					403.962.969,0	0,00								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (tahun n - 3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (n - 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2021) (tahun n - 1)		Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2021) (tahun n - 1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2021 (n - 1)				
															Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021 (n - 1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			K	Rp	K	Rp	Rp		Rp		8=(7/6)		9		10		11=(5+7+9)	
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang difasilitasi pemeliharannya		3.146.681.929,65		1.664.398.338,00	464.938.000,0						69.690.000,00		1.664.398.338,00		52,89	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAANTENAGA KERJA	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja		0,00		0,00	0,00					100.000.000,00	8.189.100,00		100.000.000,00			
2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga kerja daerah yang telah disusun		0,00		0,00	0,00					100.000.000,00	8.189.100,00		100.000.000,00			
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi		7.905.362.600		2.576.678.825,00	718.370.000,00					515.350.000,00	1.856.443.525,0		3.092.028.825,0		39,11	
		Tingkat produktivitas tenaga kerja di Sulawesi Tengah													0,00			
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan kerja tahun n		5.280.807.400		1.906.348.625,00	500.000.000,00					305.350.000,00	1.777.206.700		2.732.077.125,00		51,74	
2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang telah terakreditasi					218.370.000,00					125.000.000,00	79.236.825,00		125.000.000,00			
2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen pengukuran produktivitas tenaga kerja yang disusun		2.624.555.200,00		670.330.200,00						85.000.000,00			755.330.200,00		28,78	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terdaftar yang difasilitasi penempatannya		14.870.361.640		7.974.115.305	3.055.370.000					1.220.638.000			13.254.673.305,0		89,13	
		Persentase fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui penciptaan / perluasan kesempatan kerja													0,00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (tahun n - 3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (n - 2)						Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2021) (tahun n - 1)		Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2021) (tahun n - 1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2021 (n - 1)			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n - 2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n - 2)		Tingkat realisasi (%)						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021 (n - 1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			K	Rp	K	Rp	6		7		8=(7/6)		9		10		11=(5+7+9)		12=(11/4)	
2 07 04. 1.01	Pelayanan antar kerja lintas daerah Kab./Kota	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui pelayanan antar kerja lintas Kab./Kota		10.423.989.540,00		4.787.304.975,00														
2 07 04. 1.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LPTKS yang difasilitasi perijinannya																		
2 07 04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari kerja yang difasilitasi penempatannya melalui informasi pasar kerja		3.544.103.400,00		1.977.783.780,00														
2 07 04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah Pekerja Migran (Pra dan Purna) penempatan yang mendapatkan fasilitasi pelindungan		902.268.700,00		1.209.026.550,00														
2 07 04.1.05	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah RPTKA perpanjangan yang di fasilitasi pengesahannya																		
2 07 04.1.06	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen IMTA yang difasilitasi perpanjangannya																		
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama (PB)		5.137.756.475,00		3.664.209.249,00														
2 07 05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan (PP) yang disahkan dan perjanjian kerjabersama (PKB) yang telah didaftarkan																		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (tahun n - 3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (n - 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2021) (tahun n - 1)		Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2021) (tahun n - 1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2021 (n - 1)			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n - 2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n - 2)	Tingkat realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021 (n - 1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
			K	Rp	K	Rp	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
2 07 05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(satu) Daerah Provinsi	Jumlah peserta forum konsultasi / koordinasi antara pemerintah - serikat pekerja dan pengusaha yang dilaksanakan sebagai upaya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemogokan dan konflik lainnya.	2.792.200.000,00	1.842.769.150,00	500.000.000,00			0,00	733.100.000,00	119.271.800,00	2.575.869.150,00	92,25					
2 07 05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Persentase peningkatan kesejahteraan/upah kerja	2.345.556.475,00	1.821.440.099,00	603.100.000,00			0,00	74.100.000,00	39.608.800,00	1.895.540.099,00	80,81					
2 07 06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase jumlah perusahaan yang diawasi	4.099.013.025,00	1.972.826.200,00	324.104.600,00	324.104.600,00	100,00	250.000.000,00	360.281.100,00	2.546.930.800,00	62,14						
2 07 06 1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang diawasi dari jumlah perusahaan dalam WLKP Online	4.099.013.025,00	1.972.826.200,00	324.104.600,00	324.104.600,00	100,00	250.000.000,00	360.281.100,00	2.546.930.800,00	62,14						
3 32 02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang tersusun	4.257.424.800,00	2.406.133.495,00	959.486.000,00	828.674.395,00	86,37	927.520.000,00	279.428.000,00	4.162.327.890,00	97,77						
3 32 02 1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase kawasan / UPT bina transmigrasi yang difasilitasi sertifikasinya lahannya	4.257.424.800,00	2.406.133.495,00	959.486.000,00	828.674.395,00	86,37	927.520.000,00	279.428.000,00	4.162.327.890,00	97,77						
3 32 03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase satuan permukiman / kawasan transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	3.847.235.172,00	2.422.241.885,00	830.000.000,00	830.000.000,00	100,00	772.371.200,00	704.688.300,00	4.024.613.085,00	104,61						
3 32 03 1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah penduduk yang ditata pesebarannya / ditempatkan dalam satu kawasan transmigrasi	3.847.235.172,00	2.422.241.885,00	830.000.000,00		0,00	772.371.200,00	704.688.300,00	3.194.613.085,00	83,04						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (tahun n - 3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (n - 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2021) (tahun n - 1)		Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2021) (tahun n - 1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2021 (n - 1)				
															Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021 (n - 1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3 32 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase satuan permukiman yang berhasil dikembangkan pada kategori pemantapan	5.451.545.913,00	4.423.627.328,00	1.259.511.000,00	906.586.550,00	71,98	1.349.120.000,0	1.072.597.091,0	6.679.333.878,00	122,52							
3 32 04 1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah satuan permukiman yang telah berada pada kategori pemantapan	5.451.545.913,00	4.423.627.328,00	1.259.511.000,00	906.586.550,00	71,98	1.349.120.000,0	1.072.597.091,0	6.679.333.878,00	122,52							
<b>UPT BLKPP</b>																		
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	4.751.819.321,00	2.358.346.333,00	563.200.000,00	534.920.100,00	94,98	327.680.000,00	319.782.763,00	3.220.946.433,00	67,78							
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan layanan administrasi umum perangkat daerah	1.590.560.000,00	1.167.084.970,00	349.200.000,00	296.693.000,00	84,96	47.680.000,00	47.129.963,00	1.511.457.970,00	95,03							
2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	2.812.214.013,00	1.067.468.000,00	29.000.000,00	38.227.100,00	131,82	200.000.000,00	199.323.000,00	1.305.695.100,00	46,43							
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan								0,00	0,00							
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang difasilitasi pemeliharannya	349.045.308,00	123.793.363,00	185.000.000,00	200.000.000,00	108,11	80.000.000,00	73.329.800,00	403.793.363,00	115,69							
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi Tingkat produktivitas tenaga kerja di Sulawesi Tengah	4.582.785.942,00	1.951.980.649,00	466.800.000,00		0,00	642.000.000,00		2.593.980.649,00	56,60							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (tahun n - 3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (n - 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2021) (tahun n - 1)		Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2021) (tahun n - 1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2021 (n - 1)				
															Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021 (n - 1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan kerja tahun n	1.910.025.726,00	681.155.256,00	366.800.000,0	313.808.600,00	85,55	350.800.000,00	264.961.979,00	1.345.763.856,00	70,46							
2.07.03.1.03	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Tingkat pertumbuhan UMKM yang difasilitasi peningkatan produktivitasnya	2.128.545.658,00	953.274.553,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	175.000.000,00	79.477.500,00	1.228.274.553,00	57,70							
2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen pengukuran produktivitas tenaga kerja yang disusun	544.214.558,00	317.550.840,00	0,00			116.200.000,00	20.501.250,00	433.750.840,00	79,70							
<b>UPT PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I</b>																		
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	2.831.725.089,00	817.720.878,00	341.100.000,00	387.226.721,00	113,52	371.614.000,00	133.418.130,00	1.576.561.599,00	55,67							
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan layanan administrasi umum perangkat daerah	1.329.887.413,00	502.246.276,00	246.400.000,0	245.360.582,00	99,58	306.614.000,00	121.628.130,00	1.054.220.858,00	79,27							
2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	1.188.682.145,00	223.504.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	45.000.000,00	0,00	269.504.000,00	22,67							
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan																
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang difasilitasi pemeliharaannya	313.155.531,00	91.970.602,00	93.700.000,00	140.866.139,00	150,34	20.000.000,00	11.790.000,00	252.836.741,00	80,74							
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase jumlah perusahaan yang diawasi	3.535.622.305,00	1.197.658.616,00	608.900.000,0	284.190.145,00	46,67	434.426.000,0	83.354.500,00	1.916.274.761,00	54,20							
2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang diawasi dari jumlah perusahaan dalam WLKP Online	3.535.622.305,00	1.197.658.616,00	608.900.000,0	284.190.145,00	46,67	434.426.000,0	83.354.500,00	1.916.274.761,00	54,20							
<b>UPT PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II</b>																		
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	3.866.739.681,00	1.527.922.455,00	583.541.750,00	640.005.750,00	109,68	678.000.000,00	271.611.150,00	2.845.928.205,00	73,60							
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan layanan administrasi umum perangkat daerah	1.368.580.245,00	469.318.027,00	359.816.750,00	321.434.750,00	89,33	570.350.000,00	211.821.150,00	1.361.102.777,00	99,45							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (tahun n - 3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (n - 2)				Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2021) (tahun n - 1)		Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2021) (tahun n - 1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2021 (n - 1)			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n - 2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n - 2)		Tingkat realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021 (n - 1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			K	Rp	K	Rp	Rp		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	2.138.816.711,00	865.240.500,00	100.300.000,00		209.435.500,00		208,81						1.074.676.000,00		50,25	
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan							0,00						0,00			
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang difasilitasi pemeliharannya	359.342.725,00	193.363.928,00	123.425.000,00		109.135.500,00		88,42		107.650.000,00		59.790.000,00		410.149.428,00		114,14	
2 07 06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase jumlah perusahaan yang diawasi	2.766.426.333,00	576.004.900,00	516.458.250,00		276.832.700,00		53,60		249.520.000,00		99.060.000,00		1.102.357.600,00		39,85	
2 07 06 1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang diawasi dari jumlah perusahaan dalam WLKP Online	2.766.426.333,00	576.004.900,00	516.458.250,00		276.832.700,00		53,60		249.520.000,00		99.060.000,00		1.102.357.600,00		39,85	

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Capaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dijelaskan berdasarkan realisasi capaian target Renstra PD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2016-2021 berdasarkan Urusan Wajib dan Pilihan yang diampu, yaitu Urusan Ketenagakerjaan dan Urusan Transmigrasi .

Berdasarkan tujuan dan sasaran Disnakertrans Provinsi Sulawesi Tengah pada dokumen Reviu Renstra 2016 – 2021, target kinerja urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2020 terdiri dari 1 indikator RPJMD/IKK dan 11 indikator kinerja utama (IKU) Renstra 2016 - 2021. Berdasarkan evaluasi hasil perencanaan pada urusan ketenagakerjaan, dari 23 Indikator kinerja Daerah dan 8 indikator Kinerja utama Perangkat daerah terdapat sebanyak 3 indikator kinerja daerah yang belum tercapai yaitu laju PDRB pertenaga kerja, Tingkat partisipasi Angkatan kerja dan besaran pemeriksaan perusahaan. Hal ini diakibatkan oleh efek dari wabah pandemic covid 19 dimana Sebagian besar anggaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 difocusing untuk penanganan pandemi ini. Selain itu sektor yang paling terkena dampak dari wabah ini adalah urusan tenaga kerja , yaitu semakin tingginya angka PHK pada masa puncak pandemic ini. Berikut digambarkan capaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2020 pada tabel 2.2.



Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah

No	Indikator Kinerja	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
				Tahun 2020 (Tahun n - 2)	Tahun 2021 (Tahun n - 1)	Tahun 2022 Tahun n	Tahun 2023 (Tahun n +1)	Tahun 2020 (Tahun n - 2)	Tahun 2021 (Tahun n - 1)	Tahun 2022 Tahun n	Tahun 2023 (Tahun n +1)		
Lama	Baru	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	50		-	-	50	-	-	-		Renstra 2016 - 2021 Awal
	1		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	-	80		-	-	-	-			IKU Renstra 2016 - 2021 Reviu tahun 2019
	1		Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi			50,00					50		<b>IKU Renstra 2021 - 2026</b>
	2		Persentase pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang diberi bimbingan konsultasi	-	-	70	-	-	-	-			IKU Renstra 2016 - 2021 Reviu tahun 2019
	2		Persentase pertumbuhan produktivitas tenaga kerja			25,00					25,00	26,32	<b>IKU Renstra 2021 - 2026</b>
2			Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi	46,71	50	-	-	47	-	-	-		Renstra 2016 - 2021 Awal

No	Indikator Kinerja	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Anaisis	
				Tahun 2020 (Tahun n - 2)	Tahun 2021 (Tahun n - 1)	Tahun 2022 Tahun n	Tahun 2023 (Tahun n +1)	Tahun 2020 (Tahun n - 2)	Tahun 2021 (Tahun n - 1)	Tahun 2022 Tahun n	Tahun 2023 (Tahun n +1)		
Lama	Baru	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3	<i>Persentase pencari kerja yang ditempatkan</i>		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi	-	-	53	-	,-	-		-	IKU Renstra 2016 - 2021 Reviu tahun 2019
	3	<b>Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan</b>		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi			<b>10,00</b>				<b>10,00</b>	<b>10,74</b>	<b>IKU Renstra 2021 - 2026</b>
	4	<b>Persentase fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui penciptaan / perluasan kesempatan kerja</b>		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi			<b>0,033</b>				<b>0,033</b>	<b>0,037</b>	<b>IKU Renstra 2021 - 2026</b>
	4	<i>Persentase jumlah PMI yang ditempatkan pada jabatan formal</i>		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi	-	-	30	-	-	-	30	-	IKU Renstra 2016 - 2021 Reviu tahun 2019
3		Meningkatnya penyelesaian kasus ketenagakerjaan (persentase dari rasio antara jumlah kasus yg diselesaikan melalui perjanjian Bersama (PB) dgn jumlah kasus yg dicatatkan)		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	88	89	89	-	88	-	-	-	Renstra 2016 - 2021 Awal

No	Indikator Kinerja	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Anaisis		
				Tahun 2020 (Tahun n - 2)	Tahun 2021 (Tahun n - 1)	Tahun 2022 Tahun n	Tahun 2023 (Tahun n +1)	Tahun 2020 (Tahun n - 2)	Tahun 2021 (Tahun n - 1)	Tahun 2022 Tahun n	Tahun 2023 (Tahun n +1)			
Lama	Baru	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	5		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	-	-	90	-	-	-	90	-		IKU Renstra 2016 - 2021 Reviu tahun 2019	
	5		<b>Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama (PB)</b>			<b>66,00</b>				<b>66,00</b>	<b>68,00</b>		<b>IKU Renstra 2021 - 2026</b>	
		Meningkatnya jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan (Persentase dari Rasio antara pekerja/buruh terdaftar BPJS Ketenagakerjaan dengan Total pekerja/buruh		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	72	75	-	-	72	-	-	-		Renstra 2016 - 2021 Awal
	6	<i>Besaran Pekerja / buruh yang menjadi peserta BPJS</i>		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan			78	-	-	-	78	-		IKU Renstra 2016 - 2021 Reviu tahun 2019
	6		<b>Persentase pekerja / buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan</b>			<b>64,91</b>				<b>64,91</b>	<b>66,16</b>		<b>IKU Renstra 2021 - 2026</b>	

No	Indikator Kinerja	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Anaisis	
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
				(Tahun n - 2)	(Tahun n - 1)	Tahun n	(Tahun n +1)	(Tahun n - 2)	(Tahun n - 1)	Tahun n	(Tahun n +1)		
Lama	Baru	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Meningkatnya pemeriksaan dan pengujian peralatan di perusahaan utk menciptakan kenyamanan bekerja (persentase dr rasio antara perusahaan yg diperiksa dengan perusahaan yg terdaftar.			69	72	-	-	69	-	-	-	-	Renstra 2016 - 2021 Awal
	7 <i>Besaran pemeriksaan perusahaan</i>			-	-	75	-	-	-	75	-	-	IKU Renstra 2016 - 2021 Reviu tahun 2019
	8 <i>Besaran pengujian peralatan di perusahaan</i>			-	-	50	-	-	-	50	-	-	IKU Renstra 2016 - 2021 Reviu tahun 2019
6	Meningkatnya penempatan warga transmigrasi (persentase) dr rasio antara jumlah kepala keluarga warga transmigran yg sudah ditempatkan dgn jumlah total kepala keluarga calon transmigran yg direncanagn utk ditempatkan)		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya	79	84	-	-	79	-	-	-	-	Renstra 2016 - 2021 Awal
7	Meningkatnya motivasi warga transmigran utk tetap bermukim dilokasi (persentase dr rasio antarajml kepala keluarga transmigran yg menetap dgn jumlah kepala keluarga transmigran yg sudah ditempatkan)		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya	89	92	-	-	92	-	-	-	-	Renstra 2016 - 2021 Awal
	9 <i>Persentase transmigran yang berhasil meningkatkan taraf hidup ekonomi dan sosial</i>		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya	-	-	95	-	-	-	95	-	-	IKU Renstra 2016 - 2021 Reviu tahun 2019

No	Indikator Kinerja	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Anaisis	
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
				(Tahun n - 2)	(Tahun n - 1)	Tahun n	(Tahun n +1)	(Tahun n - 2)	(Tahun n - 1)	Tahun n	(Tahun n +1)		
Lama	Baru	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	<b>Persentase Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) bina yang tingkat pendapatan warganyapada tahap pematapan</b>					37,5						50,00	<b>IKU Renstra 2021 - 2026</b>
8	<b>Nilai rata rata pendapatan warga transmigrasi pada Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Bina (ekivalen Kg beras / KK tahun)</b>						2100					2150	<b>IKU Renstra 2021 - 2026</b>
10	<i>Persentase Jumlah Transmigran yang menetap dengan jumlah transmigran yang ditempatkan</i>		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya	-	-	95	-	-	-	-	95		IKU Renstra 2016 - 2021 Reviu tahun 2019
8	Persentase dari Kabupaten/ Kota tidak tertinggal.			53,85	61,54	- 69,23	-	53.85	-	-	-		Renstra 2016 - 2021 Awal
11	<i>Persentase Kabupaten tidak tertinggal.</i>			-	-		-	69,23	-	-	-		IKU Renstra 2016 - 2021 Reviu tahun 2019

Ket :

# xxxxxxxxxxxx

IKU Renstra 2016 - 2021 Awal

# xxxxxxxxxxxx

IKU Renstra 2016 - 2021 Reviu tahun 2019

# xxxxxxxxxxxx

IKU Renstra 2021 – 2026

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Hal ini mempertegas prinsip bahwa setiap upaya pembangunan dalam bidang ekonomi harus diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, agar setiap warga negara dapat memperoleh pekerjaan dan menempuh kehidupan yang layak.

Dari gambaran kondisi tersebut diatas memasuki pembangunan tahun 2020, pembangunan di bidang ketenagakerjaan diperkirakan masih diwarnai dengan isu-isu, antara lain :

1. Tingginya tingkat pengangguran;
2. Rendahnya perluasan kesempatan kerja;
3. Rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
4. Belum kondusifnya kondisi hubungan industrial;
5. Belum terkoordinasinya pengendalian dan pengawasan tenaga kerja asing;

Sedangkan di bidang Ketrasmigrasian, isu-isu yang diperkirakan masih mewarnai dinamika sampai lima tahun ke depan adalah :

1. Adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah karena terbatasnya aksesibilitas;
2. Rendahnya kualitas SDM, terutama dipedesaan;
3. Kurangnya keterkaitan antara kawasan pedesaan sebagai hinterlang dengan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan ekonomi.
4. Kurang terciptanya sistem kota-kota;
5. Kurang seimbangya tingkat kepadatan penduduk antara wilayah satu dengan yang lainnya;
6. Belum terintegrasinya dan terkoordinasinya program-program antar sektor dalam pembangunan kawasan transmigrasi, baik antar pemerintah pusat dan daerah.

## 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 2021 – 2026 dan Renstra Disnakertrans 2021 - 2026, serta dituangkan dalam Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Tengah pada 9 program sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Penempatan Tenaga Kerja

Program Hubungan Industrial

Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Berdasarkan telaahan evaluasi kinerja tahun lalu dan penetapan program prioritas pencapaian kinerja pemerintah Daerah Sulawesi Tengah pada RPJMD 2021 – 2026, berikut ini disajikan review rancangan awal RKPD berdasarkan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2022 .

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023

Perangkat Daerah  
Periode / Tahun

: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
: 2023

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>										
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase capaian penunjang urusan pemerintah daerah	100%	28.570.698.043	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase capaian penunjang urusan pemerintah daerah	100%	28.570.698.043	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Indeks Nilai Sakip Perangkat Daerah	B	800.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Indeks Nilai Sakip Perangkat Daerah	B	800.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun	2 Dok	450,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun	2 Dok	450,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA perangkat daerah tersusun	1 Dok	40,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA perangkat daerah tersusun	1 Dok	40,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA perangkat daerah tersusun	1 Dok	30,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA perangkat daerah tersusun	1 Dok	30,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah DPA perangkat daerah tersusun	1 Dok	30,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah DPA perangkat daerah tersusun	1 Dok	30,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah DPA perubahan perangkat daerah tersusun	1 Dok	30,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah DPA perubahan perangkat daerah tersusun	1 Dok	30,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah tersusun	12 Laporan	70,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah tersusun	12 Laporan	70,000,000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat daerah tersusun	12 Laporan	150,000,000	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat daerah tersusun	12 Laporan	150,000,000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase Realisasi Anggaran	100%	24,039,598,164	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase Realisasi Anggaran	100%	24,039,598,164	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	21,730,838,164	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	21,730,838,164	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	2,046,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	2,046,000,000	



No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah satuan unit kerja Bidang / UPT perangkat daerah yang terpenuhi penatausahaan dan verifikasi keuangannya	9 Unit Kerja	106,200,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah satuan unit kerja Bidang / UPT perangkat daerah yang terpenuhi penatausahaan dan verifikasi keuangannya	9 Unit Kerja	106,200,000	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		Jumlah bulan terpenuhinya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi perangkat daerah	12 Bulan	156,560,000	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		Jumlah bulan terpenuhinya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi perangkat daerah	12 Bulan	156,560,000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yang tersusun	2 Laporan	<b>130,000,000</b>	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yang tersusun	2 Laporan	<b>130,000,000</b>	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yang tersusun	2 Laporan	130,000,000	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yang tersusun	2 Laporan	130,000,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A	<b>338,587,500</b>	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A	<b>338,587,500</b>	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Pasang pakaian dinas yang diadakan	227 Orang	227,000,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Pasang pakaian dinas yang diadakan	227 Orang	227,000,000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah bulan terpenuhinya monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	12 Bulan	40,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah bulan terpenuhinya monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	12 Bulan	40,000,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah pegawai yang telah mengikuti sosialisasi peraturan / perundang undangan	30 Orang	39,587,500	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah pegawai yang telah mengikuti sosialisasi peraturan / perundang undangan	30 Orang	39,587,500	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Jumlah pegawai / ASN yang telah mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	20 Orang	32,000,000	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Jumlah pegawai / ASN yang telah mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	20 Orang	32,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jenis layanan administrasi umum perangkat daerah	3 Jenis	<b>383,971,849</b>	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jenis layanan administrasi umum perangkat daerah	3 Jenis	<b>383,971,849</b>	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	276,008,849	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	276,008,849	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	67,589,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	67,589,000	
					40,374,000					40,374,000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Jumlah intensitas fasilitasi pada penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	6 Kali		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Jumlah intensitas fasilitasi pada penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	6 Kali		
	Pengadaan Mebel		Jumlah jenis pengadaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	<b>1,304,118,750</b>	Pengadaan Mebel		Jumlah jenis pengadaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	<b>1,304,118,750</b>	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit / set mebel yang diadakan	1 Set	45,525,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit / set mebel yang diadakan	1 Set	45,525,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Jenis peralatan dan mesin yang diadakan	4 Jenis	193,593,750	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Jenis peralatan dan mesin yang diadakan	4 Jenis	193,593,750	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	5 Unit	1,065,000,000	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	5 Unit	1,065,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah jenis layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	4 Jenis	<b>541,921,780</b>	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah jenis layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	4 Jenis	<b>541,921,780</b>	
			Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	835,843,560			Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	835,843,560	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	124,000,000	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	124,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah jenis barang milik daerah yang difasilitasi pemeliharaannya	2 Jenis	<b>1,032,500,000</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah jenis barang milik daerah yang difasilitasi pemeliharaannya	2 Jenis	<b>1,032,500,000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan jabatan	12 Bulan	310,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan jabatan	12 Bulan	310,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 Bulan	407,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 Bulan	407,000,000	
	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGAKERJA</b>		Jumlah bulan unit peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	12 Bulan	315,500,000	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGAKERJA</b>		Jumlah bulan unit peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	12 Bulan	315,500,000	
	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>		Persentase Capaian Perencanaan Tenaga Kerja	<b>100</b>	<b>240,685,324</b>	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>		Persentase Capaian Perencanaan Tenaga Kerja	<b>100</b>	<b>240,685,324</b>	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga kerja daerah yang telah disusun	4	<b>240,685,324</b>	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga kerja daerah yang telah disusun	4	<b>240,685,324</b>	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga kerja makro yang telah disusun	3	120,000,000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga kerja makro yang telah disusun	3	120,000,000	
	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>		Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga kerja mikro yang telah disusun	1	120,685,324	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>		Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga kerja mikro yang telah disusun	1	120,685,324	
	<b>Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi</b>		Persentase Capaian pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	<b>100</b>	<b>4,063,676,557</b>	<b>Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi</b>		Persentase Capaian pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	<b>100</b>	<b>4,063,676,557</b>	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan kompetensi	230 Org	<b>3,637,550,057</b>	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan kompetensi	230 Org	<b>3,637,550,057</b>	
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan pemagangan	230 Org	3,067,264,057	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan pemagangan	230 Org	3,067,264,057	
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja		Rasio jumlah instruktur atau pengajar terhadap jumlah kelas paket pelatihan	0.22	114,786,000	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja		Rasio jumlah instruktur atau pengajar terhadap jumlah kelas paket pelatihan	0.22	114,786,000	
	<b>Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja</b>		Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan	9 Unit Kejuruan	455,500,000	<b>Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja</b>		Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan	9 Unit Kejuruan	455,500,000	
	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja		Presentase lembaga pelatihan kerja yang telah terakreditasi	4%	<b>160,000,000</b>	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja		Presentase lembaga pelatihan kerja yang telah terakreditasi	4%	<b>160,000,000</b>	
	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi</b>		Jumlah lembaga pelatihan yang telah terakreditasi	10 LPK	160,000,000	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi</b>		Jumlah lembaga pelatihan yang telah terakreditasi	10 LPK	160,000,000	
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		Jumlah Dokumen Produktivitas Tenaga Kerja	1 Dok	<b>266,126,500</b>	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		Jumlah Dokumen Produktivitas Tenaga Kerja	1 Dok	<b>266,126,500</b>	
	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGAKERJA</b>		Jumlah dokumen pengukuran produktivitas tenaga kerja regional yang disusun	1 Dok	266,126,500	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGAKERJA</b>		Jumlah dokumen pengukuran produktivitas tenaga kerja regional yang disusun	1 Dok	266,126,500	
	<b>Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Presentase caoiaan Penempatan Tenaga Kerja</b>	<b>100</b>	<b>3,853,315,420</b>	<b>Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Presentase caoiaan Penempatan Tenaga Kerja</b>	<b>100</b>	<b>3,853,315,420</b>	
	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja		Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui pelayan antar kerja lintas kab/kota	500 Orang	<b>3,380,458,095</b>	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja		Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui pelayan antar kerja lintas kab/kota	500 Orang	<b>3,380,458,095</b>	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Jumlah SDM aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	25 Orang	40,308,095	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Jumlah SDM aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	25 Orang	40,308,095	
	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)		Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan	30 Orang	65,000,000	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)		Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan	30 Orang	65,000,000	
	Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah layanan antarkerja antar daerah dan antar kerja lokal kabupaten yang dibina	13 Kab / Kota	30,000,000	Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah layanan antarkerja antar daerah dan antar kerja lokal kabupaten yang di bina	13 Kab / Kota	30,000,000	
	<b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah pencari kerja yang difasilitasi penempatan kerja melalui penciptaan wirausaha baru, padat karya infrastruktur, padat produktif	450 Orang	3,245,150,000	<b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah pencari kerja yang difasilitasi penempatan kerja melalui penciptaan wirausaha baru, padat karya infrastruktur, padat produktif	450 Orang	3,245,150,000	
	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS		Jumlah LPTKS yang difasilitasi perizinannya	3 LPTKS	30,000,000	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS		Jumlah LPTKS yang difasilitasi perizinannya	3 LPTKS	30,000,000	
	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>		Jumlah Kabupaten / Kota yang terpantau Operasional LPTKS nya	4 Kab/ Kota	30,000,000	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>		Jumlah Kabupaten / Kota yang terpantau Operasional LPTKS nya	4 Kab/ Kota	30,000,000	
	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah pencari kerja yang difasilitasi penempatannya melalui informasi pasar kerja	50 Orang	145,000,800	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah pencari kerja yang difasilitasi penempatannya melalui informasi pasar kerja	50 Orang	145,000,800	
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah sistem informasi pasar kerja online yang terfasilitasi operasional pemeliharaannya	1 Aplikasi	35,000,000	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah sistem informasi pasar kerja online yang terfasilitasi operasional pemeliharaannya	1 Aplikasi	35,000,000	
	Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah pencari kerja yang difasilitasi penempatannya melalui pasar kerja online	20 Orang	30,000,800	Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah pencari kerja yang difasilitasi penempatannya melalui pasar kerja online	20 Orang	30,000,800	
	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi</b>		Jumlah pencari kerja yang difasilitasi penempatan nya melalui bursa kerja	300 org	80,000,000	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi</b>		Jumlah pencari kerja yang difasilitasi penempatan nya melalui bursa kerja	300 org	80,000,000	
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Jumlah pekerja migran (pra dan puma) penempatan yang mendapatkan perlindungan	70 Orang	209,958,600	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Jumlah pekerja migran (pra dan puma) penempatan yang mendapatkan perlindungan	70 Orang	209,958,600	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran		Jumlah calon pekerja migran indonesia yang diberikan pelatihan / bimbingan konsultasi	50 Orang	80,000,000	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran		Jumlah calon pekerja migran indonesia yang diberikan pelatihan / bimbingan konsultasi	50 Orang	80,000,000	
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan		Jumlah Jejaring mitra koordinasi pelayanan keberangkatan dan keputungan pekerja migran indonesia	6 Stakholder	75,000,000	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan		Jumlah Jejaring mitra koordinasi pelayanan keberangkatan dan keputungan pekerja migran indonesia	6 Stakholder	75,000,000	
	<b>Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		Jumlah PMI Purna yang mendapatkan pemberdayaan kapasitas	20 Orang	54,958,600	<b>Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		Jumlah PMI Purna yang mendapatkan pemberdayaan kapasitas	20 Orang	54,958,600	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Penerbitan Dokumen Perpanjangan IMTA	30 Dokumen	<b>87,897,925</b>	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Penerbitan Dokumen Perpanjangan IMTA	30 Dokumen	<b>87,897,925</b>	
	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>		Jumlah Penerbitan Dokumen Perpanjangan IMTA	30 Dokumen	87,897,925	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>		Jumlah Penerbitan Dokumen Perpanjangan IMTA	30 Dokumen	87,897,925	
	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase capaian hubungan industrial</b>	<b>100</b>	<b>505,734,200</b>	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase capaian hubungan industrial</b>	<b>100</b>	<b>505,734,200</b>	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial		Jumlah perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja bersama (PKB) yang telah didaftarkan	50 Perusahaan	<b>165,264,850</b>	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial		Jumlah perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja bersama (PKB) yang telah didaftarkan	50 Perusahaan	<b>165,264,850</b>	
	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		Jumlah perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja bersama (PKB) yang telah didaftarkan	50 Perusahaan	165,264,850	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		Jumlah perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja bersama (PKB) yang telah didaftarkan	50 Perusahaan	165,264,850	
			Jumlah Peserta forum konsultasi koordinasi antara pemerintah, serikat pekerja dan pengusaha	92 Orang	<b>252,850,000</b>			Jumlah Peserta forum konsultasi koordinasi antara pemerintah, serikat pekerja dan pengusaha	92 Orang	<b>252,850,000</b>	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi		Angka sengketa pekerja pengusaha per tahun	60 Kasus		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi		Angka sengketa pekerja pengusaha per tahun	60 Kasus		

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah pekerja dan pengusaha yang mengikuti Simposium/ Pertemuan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	50 Orang	107,889,100			Jumlah pekerja dan pengusaha yang mengikuti Simposium/ Pertemuan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	50 Orang	107,889,100	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi		Perselisihan Buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	50 Kasus		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi		Perselisihan Buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	50 Kasus		
	<b>Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)</b>		Jumlah peserta forum konsultasi, koordinasi, pembinaan kinerja, dan pemberdayaan LKS Tripartit	42 Orang	144,960,900	<b>Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)</b>		Jumlah peserta forum konsultasi, koordinasi, pembinaan kinerja, dan pemberdayaan LKS Tripartit	42 Orang	144,960,900	
			Persentase peningkatan kesejahteraan/ upah kerja	90%	<b>87,619,350</b>			Persentase peningkatan kesejahteraan/ upah kerja	90%	<b>87,619,350</b>	
	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)		Persentase Jumlah Perusahaan yang mengikuti Jamsostek	73%		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)		Persentase Jumlah Perusahaan yang mengikuti Jamsostek	73%		
	<b>PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</b>		Persentase peningkatan kesejahteraan/ upah kerja	90%	87,619,350	<b>PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</b>		Persentase peningkatan kesejahteraan/ upah kerja	90%	87,619,350	
	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan</b>		<b>Persentase capaian pengawasan ketenagakerjaan</b>	<b>100%</b>	<b>226,906,713</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan</b>		<b>Persentase capaian pengawasan ketenagakerjaan</b>	<b>100%</b>	<b>226,906,713</b>	
	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan		Besaran jumlah perusahaan yang mendapat bimbingan penyuluhan ketenagakerjaan	200 Perusahaan	<b>226,906,713</b>	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan		Besaran jumlah perusahaan yang mendapat bimbingan penyuluhan ketenagakerjaan	200 Perusahaan	<b>226,906,713</b>	
	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang mendapatkan Bimbingan Penyuluhan Hukum Ketenagakerjaan	100 Perusahaan	100,906,713	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang mendapatkan Bimbingan Penyuluhan Hukum Ketenagakerjaan	100 Perusahaan	100,906,713	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>		Jumlah perusahaan yang mendapatkan Bimbingan Penyuluhan Keselamatan kerja di Lingkungan kerja	100 Perusahaan	126,000,000	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>		Jumlah perusahaan yang mendapatkan Bimbingan Penyuluhan Keselamatan kerja di Lingkungan kerja	100 Perusahaan	126,000,000	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>					

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>				3,363,544,364	<b>PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>				3,363,544,364	
	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		Persentase Capaian Perencanaan Kawasan Transmigrasi	100%	653,671,648	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		Persentase Capaian Perencanaan Kawasan Transmigrasi	100%	653,671,648	
	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi		Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi pernebitan sertifikat lahannya	9 UPT	653,671,648	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi		Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi pernebitan sertifikat lahannya	9 UPT	653,671,648	
	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan		Jumlah Dokumen Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang tersusun	3 Dok	218,020,000	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan		Jumlah Dokumen Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang tersusun	3 Dok	218,020,000	
	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi		Jumlah rumusan rapat penyelesaian pertanahan kawasan transmigrasi	2 Laporan	115,000,000	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi		Jumlah rumusan rapat penyelesaian pertanahan kawasan transmigrasi	2 Laporan	115,000,000	
	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	2 Dokumen	110,000,000	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	2 Dokumen	110,000,000	
	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>		Jumlah Dokumen Penatausahaan Pertanahan Kawasan Transmigrasi yang tersusun	4 Dokumen	210,651,648	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>		Jumlah Dokumen Penatausahaan Pertanahan Kawasan Transmigrasi yang tersusun	4 Dokumen	210,651,648	
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase Capaian Pembangunan Kawasan Transmigrasi	100%	1,537,895,594	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase Capaian Pembangunan Kawasan Transmigrasi	100%	1,537,895,594	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah KK yang ditata persebarannya / ditempatkan dalam satu kawasan transmigrasi	25 KK	1,537,895,594	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah KK yang ditata persebarannya / ditempatkan dalam satu kawasan transmigrasi	25 KK	1,537,895,594	
	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran		Jumlah kesepakatan dan kesepahaman kerjasama pembangunan transmigrasi antar pemerintah kabupaten, yang difasilitasi	3 Laporan	148,856,700	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran		Jumlah kesepakatan dan kesepahaman kerjasama pembangunan transmigrasi antar pemerintah kabupaten, yang difasilitasi	3 Laporan	148,856,700	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi		Jumlah sarana dan prasarana dasar yang dibangun	5 Unit	1,199,075,140	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi		Jumlah sarana dan prasarana dasar yang dibangun	5 Unit	1,199,075,140	
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi		Jumlah warga / penduduk setempat sekitar kawasan transmigrasi yang di fasilitasi persebarannya	30 KK	45,460,500	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi		Jumlah warga / penduduk setempat sekitar kawasan transmigrasi yang di fasilitasi persebarannya	30 KK	45,460,500	
	Penyuluhan Transmigrasi		Jumlah warga / penduduk setempat sekitar kawasan transmigrasi yang di fasilitasi penempatannya	30 KK	55,055,575	Penyuluhan Transmigrasi		Jumlah warga / penduduk setempat sekitar kawasan transmigrasi yang di fasilitasi penempatannya	30 KK	55,055,575	
	Pelatihan Transmigrasi		Jumlah warga transmigrasi yang mendapatkan penyuluhan	25 KK	32,239,679	Pelatihan Transmigrasi		Jumlah warga transmigrasi yang mendapatkan penyuluhan	25 KK	32,239,679	
	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi		Jumlah warga transmigrasi yang mendapatkan pelatihan	25 KK	22,340,325	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi		Jumlah warga transmigrasi yang mendapatkan pelatihan	25 KK	22,340,325	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>		Jumlah warga transmigrasi yang baru ditempatkan mendapatkan pelatihan penyesuaian integrasi sosial	25 Orang	34,867,675	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>		Jumlah warga transmigrasi yang baru ditempatkan mendapatkan pelatihan penyesuaian integrasi sosial	25 Orang	34,867,675	
	<b>Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan</b>		<b>Persentase Capaian Pengembangan Kawasan Transmigrasi</b>	<b>100%</b>	<b>1,171,977,122</b>	<b>Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan</b>		<b>Persentase Capaian Pengembangan Kawasan Transmigrasi</b>	<b>100%</b>	<b>1,171,977,122</b>	
	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman		Jumlah satuan permukiman yang dibina yang berada pada kategori pemantapan	1 UPT	1,171,977,122	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman		Jumlah satuan permukiman yang dibina yang berada pada kategori pemantapan	1 UPT	1,171,977,122	
			Jumlah UPT bina yang difasilitasi peningkatan kualitas SDM nya	7 UPT	1,100,000,000			Jumlah UPT bina yang difasilitasi peningkatan kualitas SDM nya	7 UPT	1,100,000,000	
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman					Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman					



No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANANDASAR		Jumlah UPT bina yang difasilitasi penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaannya	7 UPT	621,977,122	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Jumlah UPT bina yang difasilitasi penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaannya	7 UPT	621,977,122	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA ( UPT. BALAI LATIHANKERJA DAN PENINGKATAN PRODUKTIFAS)					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGTENAGA KERJA ( UPT. BALAI LATIHAN KERJA DAN PENINGKATAN PRODUKTIFAS)					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1,500,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1,500,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase capaian penunjang urusan pemerintah daerah	100%	500,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase capaian penunjang urusan pemerintah daerah	100%	500,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jenis layanan administrasi umum perangkat daerah	2 Jenis	84,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jenis layanan administrasi umum perangkat daerah	2 Jenis	84,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	24,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	24,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah intensitas fasilitasi pada penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3 Kali	60,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah intensitas fasilitasi pada penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3 Kali	60,000,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah jenis pengadaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	1 Jenis	200,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah jenis pengadaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	1 Jenis	200,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Unit	200,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Unit	200,000,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah jenis layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2 Jenis	66,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah jenis layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2 Jenis	66,000,000	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	6,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	6,000,000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	60,000,000	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	60,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah jenis barang milik daerah yang difasilitasi pemeliharaannya	1 Jenis	150,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah jenis barang milik daerah yang difasilitasi pemeliharaannya	1 Jenis	150,000,000	
	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DANPRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>		Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan jabatan	12 Bulan	150,000,000	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DANPRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>		Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan jabatan	12 Bulan	150,000,000	
	<b>Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkanKlaster Kompetensi</b>		Persentase Capaian pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	100%	1,000,000,000	<b>Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi</b>		Persentase Capaian pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	100%	1,000,000,000	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah pencari kerja yang memilikisertifikat kompetensi	48 Orang	500,000,000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	48 Orang	500,000,000	
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi	96 Orang	400,000,000	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi	96 Orang	400,000,000	
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja		Jumlah dokumen / laporan hasil Training Need Analisis yang dilaksanakan	2 Laporan	40,000,000	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja		Jumlah dokumen / laporan hasil Training Need Analisis yang dilaksanakan	2 Laporan	40,000,000	
	<b>Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah</b>		Jumlah sarana pelatihan kerja yang diadakan untuk mendukung pelaksanaan pelatihan	1 Unit Kejuruan	60,000,000	<b>Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah</b>		Jumlah sarana pelatihan kerja yang diadakan untuk mendukung pelaksanaan pelatihan	1 Unit Kejuruan	60,000,000	
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitaskepada Perusahaan Menengah		Jumlah UMKM yang difasilitasi peningkatan produktivitasnya	30 UMKM	200,000,000	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah		Jumlah UMKM yang difasilitasi peningkatan produktivitasnya	30 UMKM	200,000,000	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi</b>		Jumlah UMKM yang difasilitasi peningkatan produktivitasnya	30 UMKM	200,000,000	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi</b>		Jumlah UMKM yang difasilitasi peningkatan produktivitasnya	30 UMKM	200,000,000	
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		Jumlah dokumen pengukuran produktivitas yang disusun	2 Dokumen	300,000,000	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		Jumlah dokumen pengukuran produktivitas yang disusun	2 Dokumen	300,000,000	
			Jumlah dokumen pengukuran produktivitas yang disusun		300,000,000			Jumlah dokumen pengukuran produktivitas yang disusun		300,000,000	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANANDASAR</b>			2 Dokumen		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			2 Dokumen		
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA ( UPT. PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I )</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA ( UPT. PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I )</b>					
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				500,000,000	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				500,000,000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase capaian penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>254,592,000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase capaian penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>254,592,000</b>	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jenis layanan administrasi umum perangkat daerah	2 Jenis	115,635,500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jenis layanan administrasi umum perangkat daerah	2 Jenis	115,635,500	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	8,509,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	8,509,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12,508,600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12,508,600	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Jumlah intensitas fasilitasi pada penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 Kali	94,617,900	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Jumlah intensitas fasilitasi pada penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 Kali	94,617,900	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah jenis pengadaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	1 Jenis	23,770,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah jenis pengadaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	1 Jenis	23,770,000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Unit	23,770,000	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Unit	23,770,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah jenis layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Jenis	24,499,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah jenis layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Jenis	24,499,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	4,200,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	4,200,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	7,380,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	7,380,000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12,919,000	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12,919,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah jenis barang milik daerah yang difasilitasi pemeliharannya	2 Jenis	90,687,500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah jenis barang milik daerah yang difasilitasi pemeliharannya	2 Jenis	90,687,500	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan jabatan	12 Bulan	83,427,500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan jabatan	12 Bulan	83,427,500	
	<b>PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</b>		Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12 Bulan	7,260,000	<b>PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</b>		Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12 Bulan	7,260,000	
	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan</b>		Persentase capaian pengawasan ketenagakerjaan	<b>100%</b>	<b>245,408,000</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan</b>		Persentase capaian pengawasan ketenagakerjaan	<b>100%</b>	<b>245,408,000</b>	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan		Besaran Pemeriksaan Perusahaan	300 Perusahaan	245,408,000	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan		Besaran Pemeriksaan Perusahaan	300 Perusahaan	245,408,000	
	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan		Jumlah perusahaan yang menerapkan pelaksanaan norma kerja	300 Perusahaan	122,074,500	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan		Jumlah perusahaan yang menerapkan pelaksanaan norma kerja	300 Perusahaan	122,074,500	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANANDASAR</b>		Besaran Pengujian peralatan di perusahaan	150 Perusahaan	123,333,500	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		Besaran Pengujian peralatan di perusahaan	150 Perusahaan	123,333,500	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA ( UPT. PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II )</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA ( UPT. PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II )</b>					
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				500,000,000	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				500,000,000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase capaian penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100</b>	<b>300,000,000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase capaian penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100</b>	<b>300,000,000</b>	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jenis layanan administrasi umum perangkat daerah	3 Jenis	115,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jenis layanan administrasi umum perangkat daerah	3 Jenis	115,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	50,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	50,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah bulan terpenuhinya a Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	15,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah bulan terpenuhinya a Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	15,000,000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah intensitas fasilitasi pada penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 Kali	50,000,000	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah intensitas fasilitasi pada penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 Kali	50,000,000	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah jenis layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2 Jenis	150,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah jenis layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2 Jenis	150,000,000	
			Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	50,000,000			Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	50,000,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	100,000,000	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	100,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah jenis barang milik daerah yang difasilitasi pemeliharaannya	1 Jenis	35,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah jenis barang milik daerah yang difasilitasi pemeliharaannya	1 Jenis	35,000,000	
	<b>PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</b>		Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan jabatan!	1 Jenis	35,000,000	<b>PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</b>		Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan jabatan!	1 Jenis	35,000,000	
	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan</b>		<b>Persentase capaian pengawasan ketenagakerjaan</b>	<b>100%</b>	<b>200,000,000</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan</b>		<b>Persentase capaian pengawasan ketenagakerjaan</b>	<b>100%</b>	<b>200,000,000</b>	
	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan		Besaran Pemeriksaan Perusahaan	50 Perusahaan	200,000,000	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan		Besaran Pemeriksaan Perusahaan	50 Perusahaan	200,000,000	
	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan		Jumlah perusahaan yang menerapkan pelaksanaan norma kerja	50 Perusahaan	100,000,000	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan		Jumlah perusahaan yang menerapkan pelaksanaan norma kerja	50 Perusahaan	100,000,000	
			Besaran Pengujian peralatan di perusahaan	50 Perusahaan	123,333,500			Besaran Pengujian peralatan di perusahaan	50 Perusahaan	123,333,500	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Dari Masyarakat

Disnakertrans Provinsi Sulawesi Tengah akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan masyarakat, yaitu untuk menjaring kegiatan aspirasi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Asosiasi – Asosiasi, pemerintah Kabupaten/kota maupun hasil pengumpulan informasi sendiri terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan pada tahun 2023. Adapun hasil telaah dari program dan kegiatan belanja langsung tahun 2023 yang merupakan penjaringan dari usulan pemerintah kab./kota se Sulawesi Tengah pada forum musrembang tahun 2022 digambarkan pada table 2.4. sebagai berikut .

Tabel 2.4  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Perangkat Daerah  
Periode / Tahun

: DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH  
: 2023

No.	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan
1	2	3	4	5		6
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi			
	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan kerja tahun n			
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (kejuruan Automotif sepeda motor dan tata boga)	Kab. Banggai Kepulauan	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi / masyarakat	2 paket (32 orang)	130.000.000,00	usulan akan di prioritaskan berdasarkan ketersediaan anggaran dan dibahas lebih lanjut pada forum koordinasi selanjutnya
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (kejuruan menjahit)	Kab. Banggai Laut (Kec Banggai)	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi / masyarakat	1 paket (16 orang)	80.000.000,00	usulan akan di prioritaskan berdasarkan ketersediaan anggaran dan dibahas lebih lanjut pada forum koordinasi selanjutnya
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (kejuruan menjahit)	Kab. Banggai (Kec Luwuk)	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi / masyarakat	1 paket (16 orang)	75.000.000,00	usulan akan di prioritaskan berdasarkan ketersediaan anggaran dan dibahas lebih lanjut pada forum koordinasi selanjutnya
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (kejuruan menjahit)	Kab. Donggala (Kec Banawa)	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi / masyarakat	1 paket (16 orang)	75.000.000,00	usulan akan di prioritaskan berdasarkan ketersediaan anggaran dan dibahas lebih lanjut pada forum koordinasi selanjutnya
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (kejuruan Las)	Kab. Morowali (Kec Bungku Tengah)	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi / masyarakat	1 paket (16 orang)	80.000.000,00	usulan akan di prioritaskan berdasarkan ketersediaan anggaran dan dibahas lebih lanjut pada forum koordinasi selanjutnya



No.	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan
1	2	3	4	5		6
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja (kejuruan otomotif)	Kab. Banggai Kepulauan	Jumlah sarana pelatihan kerja yang diadakan untuk mendukung pelaksanaan pelatihan	1 paket (unit kejuruan)	150.000.000,00	usulan akan di prioritaskan berdasarkan ketersediaan anggaran dan dibahas lebih lanjut pada forum koordinasi selanjutnya
	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah					
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah (UMKM)	Kab. Banggai Kepulauan	Jumlah UMKM yang mendapatkan bimbingan konsultasi peningkatan produktivitas	1 Paket Bimbingan Konsultasi (6 UMKM)	80.000.000,00	usulan akan di prioritaskan berdasarkan ketersediaan anggaran dan dibahas lebih lanjut pada forum koordinasi selanjutnya
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui penciptaan / perluasan kesempatan kerja			
	Pelayanan antar kerja lintas daerah Kab./Kota		Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui pelayanan antar kerja lintas			
	Perluasan Kesempatan Kerja (fasilitasi perluasan kesempatan kerja melalui penciptaan wirausaha baru, padat karya produktif, penerapan teknologi tepat guna dan padat karya infrastruktur sederhana)	Kab. Banggai Kepulauan (desa mato, desa Tatengkeng, desa Labibi)	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	3 paket kegiatan	360.000.000,00	usulan akan di prioritaskan berdasarkan ketersediaan anggaran dan dibahas lebih lanjut pada forum koordinasi selanjutnya
	Perluasan Kesempatan Kerja (fasilitasi perluasan kesempatan kerja melalui padat karya infrastruktur sederhana)	Kab. Donggala	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	1 paket kegiatan	150.000.000,00	usulan akan di prioritaskan berdasarkan ketersediaan anggaran dan dibahas lebih lanjut pada forum koordinasi selanjutnya
	Perluasan Kesempatan Kerja (fasilitasi perluasan kesempatan kerja melalui padat karya infrastruktur sederhana)	Kab. Morowali (Kec Bungku Tengah)	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	1 paket kegiatan	150.000.000,00	usulan akan di prioritaskan berdasarkan ketersediaan anggaran dan dibahas lebih lanjut pada forum koordinasi selanjutnya

No.	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Pagu Indikatif(Rp)	Catatan
1	2	3	4	5		6
	Perluasan Kesempatan Kerja (fasilitasi perluasan kesempatan kerja melalui penciptaan wirausaha baru, padat karya produktif, penerapan teknologi tepat guna dan padat karya infrastruktur sederhana)	Kab. Toli Toli (desa salugan, desa timbolo, dampal selatan)	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	3 paket kegiatan	310.000.000,00	usulan akan di prioritaskan berdasarkan ketersediaan anggaran dan dibahas lebih lanjut pada forum koordinasi selanjutnya
	Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	Kab. Banggai Laut	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan	40 orang	60.000.000,00	usulan akan di prioritaskan berdasarkan ketersediaan anggaran dan dibahas lebih lanjut pada forum koordinasi selanjutnya
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi		Jumlah Pekerja Migran (Pra dan Purna) penempatan yang mendapatkan			
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kab. Toli Toli	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	32 Orang	135.000.000,00	usulan akan di prioritaskan berdasarkan ketersediaan anggaran dan dibahas lebih lanjut pada forum koordinasi selanjutnya
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama (PB)			
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(satu) Daerah Provinsi		Jumlah peserta forum konsultasi / koordinasi antara pemerintah - serikat pekerja dan pengusaha yang dilaksanakan sebagai upaya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemogokan dan konflik lainnya.			
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi (sosialisasi Undang undang no. 13 tahun 2012/Undang undang Cipta Kerja)	Kab. Donggala	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	40 orang	40.000.000,00	usulan akan di prioritaskan berdasarkan ketersediaan anggaran dan dibahas lebih lanjut pada forum koordinasi selanjutnya

No.	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan
1	2	3	4	5		6
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi (sosialisasi Undang undang no. 13 tahun 2021/Undang undang Cipta Kerja)	Kab. Morowali (Kec Bungku Tengah)	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 orang	80.000.000,00	usulan akan di prioritaskan berdasarkan ketersediaan anggaran dan dibahas lebih lanjut pada forum koordinasi selanjutnya
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang tersusun			
	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		Persentase kawasan / UPT bina transmigrasi yang difasilitasi sertifikasinya			
	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi (Penyusunan dokumen studi identifikasi RKT Lalundu Bambakeuni)	Kab. Donggala	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjakamkan dengan Daerah Lain	1 Dokumen	300.000.000,00	usulan akan di prioritaskan berdasarkan ketersediaan anggaran dan dibahas lebih lanjut pada forum koordinasi selanjutnya
	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi (Penyusunan dokumen RKT Toli Toli utara)	Kab. Toli Toli	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	250.000.000,00	usulan akan di prioritaskan berdasarkan ketersediaan anggaran dan dibahas lebih lanjut pada forum koordinasi selanjutnya
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase satuan permukiman / kawasan transmigrasi yang difasilitasi			
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah penduduk yang ditata penyebarannya / ditempatkan dalam satu kawasan transmigrasi			
	Penyuluhan Transmigrasi	Kab. Banggai Laut (kec. Dungkean)	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	29 Orang	45.000.000,00	usulan akan di prioritaskan berdasarkan ketersediaan anggaran dan dibahas lebih lanjut pada forum koordinasi selanjutnya

No.	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan
1	2	3	4	5		6
	Pelatihan Transmigrasi	Kab. Banggai Laut (kec.Dungkean)	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	29 Orang	45.000.000,00	usulan akan di prioritaskan berdasarkan ketersediaan anggaran dan dibahas lebih lanjut pada forum koordinasi selanjutnya
	Pelatihan Transmigrasi	Kab. Banggai (kec.Toili)	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	29 Orang	65.000.000,00	usulan akan di prioritaskan berdasarkan ketersediaan anggaran dan dibahas lebih lanjut pada forum koordinasi selanjutnya
	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran (pembukaan dan peningkatan jalan SP3 Tinauka)	Kab. Donggala (SP3 TinaukaKec Rio Pakava)	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	2 Km	200.000.000,00	usulan akan di prioritaskan berdasarkan ketersediaan anggaran dan dibahas lebih lanjut pada forum koordinasi selanjutnya
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase satuan permukiman yang berhasil dikembangkan pada kategori pemantapan			
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan		Jumlah satuan permukiman yang telah berada pada kategori pemantapan			
	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Kab. Banggai Laut (kec.Bangkurung)	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	29 orang	50.000.000,00	usulan akan di prioritaskan berdasarkan ketersediaan anggaran dan dibahas lebih lanjut pada forum koordinasi selanjutnya
	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman (pelatihan kewirausahaan)	Kab. Donggala (SP3 Tinauka)	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	32 orang	75.000.000,00	usulan akan di prioritaskan berdasarkan ketersediaan anggaran dan dibahas lebih lanjut pada forum koordinasi selanjutnya
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman (jalan rabat beton)	Kab. Banggai Laut (kec.Bangkurung)	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 km	150.000.000,00	usulan akan di prioritaskan berdasarkan ketersediaan anggaran dan dibahas lebih lanjut pada forum koordinasi selanjutnya

No.	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan
1	2	3	4	5		6
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman (peningkatan jalan permukiman dan pembangunan jaringan air bersih)	Kab.Morowali Utara (UPT Tokala atas)	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	2 paket	300.000.000,00	usulan akan di prioritaskan berdasarkan ketersediaan anggaran dan dibahas lebih lanjut pada forum koordinasi selanjutnya
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman (peningkatan jalan permukiman dan pembangunan PAUD)	Kab.Morowali (UPT Kabera)	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	2 paket	400.000.000,00	usulan akan di prioritaskan berdasarkan ketersediaan anggaran dan dibahas lebih lanjut pada forum koordinasi selanjutnya

TUJUAN DAN  
SASARAN  
PERANGKAT  
DAERAH

BAB 3

## BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

### 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional menyangkut kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan pada agenda dan sasaran pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian merupakan bagian dari agenda dan sasaran pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan lintas bidang dan pembangunan wilayah demi terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional, yaitu : visi Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 -2024 yaitu, "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong". Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 - 2024 adalah:

- a. peningkatan kualitas manusia indonesia;
- b. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- c. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- g. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- h. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
- i. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

#### 1.1.1. Telaah Renstra Kementerian Ketenagakerjaan

Di masa mendatang, sektor ekonomi semakin membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian digital, mengingat mulai bermunculan gejala transformasi ekonomi ke arah automation (otomatisasi) atau digital ekonomi. Bagaimana tenaga kerja berpendidikan rendah tersebut mampu menghadapi proses transformasi ekonomi Tentu diperlukan kebijakan untuk mempercepat peningkatan skill SDM agar dinamika

sektor ekonomi mampu diimbangi dengan penyediaan kualitas dan kuantitas tenaga kerja.

Dalam Renstra K/L disebutkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki peranan yang sangat penting untuk menciptakan SDM yang berkualitas khususnya pada aspek human capital dalam pembangunan Indonesia. Dimana telah terjadi dinamika dalam pembangunan ketenagakerjaan mengingat kondisi ketenagakerjaan sebagai muara dari berbagai kondisi di hulu, maka keberpihakan pemerintah dalam bentuk kebijakan ekonomi, politik dan sosial sangat berpengaruh kepada akselerasi pembangunan bidang ketenagakerjaan.

Tema pembangunan bidang ketenagakerjaan adalah pembangunan yang kuat, inklusif dan berkelanjutan dengan agenda penguatan faktor utama pembangunan ekonomi melalui peningkatan daya saing tenaga kerja, memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis serta memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Renstra Kemenaker RI mengangkat permasalahan diantaranya kemiskinan, ketimpangan ekonomi dan Middle Income Trap, Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Daya saing tenaga kerja, Pasar kerja dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan. Untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019 - 2024, Kementerian Ketenagakerjaan menuangkannya ke dalam dua sasaran strategis, yakni:

- a. Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel.

Masalah daya saing tenaga kerja yang rendah ini berkaitan dengan kualitas SDM yang rendah, karena tenaga kerja masih didominasi oleh lulusan SD (40,7 persen), sementara tidak semua tenaga kerja lulusan pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesiapan dan kapasitas sesuai kebutuhan dunia kerja. Mismatch keterampilan, kesenjangan kualitas Pendidikan antar wilayah, keterbatasan talenta untuk siap dilatih dan bekerja menjadi isu-isu yang perlu ditangani dalam peningkatan kualitas tenaga kerja.

- b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.



Tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan menuju pada Pemerintahan yang dinamis (Dynamic Government), yaitu suatu tata kelola pemerintahan yang responsif atas aspirasi masyarakat, perubahan lingkungan strategis pembangunan yang cepat tanggap dan mampu mengelola perubahan.

Arah kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan ditujukan dalam rangka mewujudkan "*Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan*". Adapun arah kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan dijabarkan sebagai berikut:

a. Arah Kebijakan 1

Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas dengan sasaran program untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan pelatihan vokasi dan meningkatkan produktivitas pekerja di sektor prioritas. Upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas dilaksanakan dengan strategi:

1. Meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan pelatihan vokasi;
2. Meningkatkan produktivitas pekerja;
3. Meningkatkan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan;
5. Melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja;
6. Meningkatkan kompetensi instruktur dan tenaga kepelatihan;
7. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja;

b. Arah Kebijakan 2

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja, dengan sasaran program meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan. Upaya penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja dilaksanakan dengan strategi:

1. Meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan di dalam negeri;
2. Meningkatkan perlindungan dalam penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri;
3. Meningkatkan tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja;
4. Meningkatkan jumlah wirausaha baru melalui inkubasi bisnis;

5. Melaksanakan pengendalian tenaga kerja asing (TKA) melalui pelayanan perizinan yang transparan dan akuntabel.

c. Arah kebijakan 3

Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, dengan sasaran program meningkatkan peran pengawasan ketenagakerjaan dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dengan kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan. Upaya perlindungan tenaga kerja dan pengembangan system pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan dengan strategi:

1. Meningkatkan kualitas teknis pemeriksaan dan penyidikan norma ketenagakerjaan;
2. Meningkatkan penerapan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
3. Meningkatkan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak;
4. Meningkatkan penerapan norma keselamatan dan Kesehatan kerja;
5. Meningkatkan kualitas dan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja;
6. Menurunkan tingkat risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja;

d. Arah Kebijakan 4

Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dengan sasaran program meningkatkan jaminan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial pada perusahaan. Upaya pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja dilaksanakan dengan strategi :

1. Meningkatkan kuantitas/kualitas kelembagaan hubungan industrial;
2. Meningkatkan penerapan kebijakan tentang pengupahan serta struktur dan skala upah;
3. Meningkatkan efektifitas pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
4. Meningkatkan perlindungan hak bagi pekerja/buruh dan pengusaha melalui pengaturan syarat kerja;
5. Meningkatkan program, manfaat, dan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

### 3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Tugas tersebut, secara spesifik merupakan instrumen untuk melaksanakan misi ketiga Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, serta Agenda Prioritas Nasional ke-2 yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Visi dan misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi merupakan instrument untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dirumuskan berdasarkan RPJMN 2020-2024. Visi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi pada kurun waktu 2020-2024 adalah: ***“Terwujudnya Perdesaan yang memiliki keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing secara berkelanjutan dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan GotongRoyong”***. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka misi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan Desa dan Perdesaan yang berkelanjutan;
2. Mengembangkan ekonomi dan investasi Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan kawasan Transmigrasi;
3. Menyeraskan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal;
4. Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan Kawasan transmigrasi;
5. Menyusun dan merumuskan pengembangan daya saing Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan kawasan Transmigrasi berbasis data dan informasi yang akurat;
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi dan
7. Meningkatkan penatakelolaan pemerintahan yang baik.

Tujuan yang ingin dicapai pada kurun 2020-2024 sesuai dengan visi dan misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, sebagai berikut:

1. Mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan;

2. Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan Kawasan transmigrasi;
3. Berkurangnya jumlah daerah tertinggal;
4. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan system pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
5. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dalam pengembangan daya saing melalui kreativitas dan teknologi berbasis ilmu pengetahuan, data dan informasi dalam pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
6. Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi; dan
7. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang *agile*, efektif, efisien dan terpercaya.

Pembangunan kewilayahan tahun 2020-2024 menekankan keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial yang didasarkan bukti data, informasi dan pengetahuan yang baik, akurat dan lengkap, skenario pembangunan nasional, serta lokasi yang jelas sesuai rencana tata ruang dan daya dukung lingkungan. Selain itu, pembangunan kewilayahan juga mengutamakan pendekatan holistik dan tematik yang didasarkan penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada prioritas pembangunan dan lokasi yang paling relevan sesuai dengan pendekatan koridor pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan kewilayahan dilaksanakan secara terintegrasi dengan mengutamakan kerjasama dan keterpaduan program dan kegiatan antar kementerian/lembaga, antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, antar pemerintah daerah, serta antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam perencanaan, pendanaan dan pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Arah pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Sulawesi Tengah periode 2021 – 2024 secara keseluruhan tercantum dalam suatu Visi, Misi, dan Program Prioritas yang terangkum dalam dalam suatu tag line spirit **“KERJA CEPAT DAN TUNTAS DENGAN KEJUJURAN”**. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Sulawesi Tengah 2021 – 2026 **“Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih maju”**, akan dijabarkan pencapaiannya melalui serangkaian misi sebagai berikut :

- Misi 1: Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.
- Misi 2: Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.
- Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.
- Misi 4: Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.
- Misi 5: Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.
- Misi 6: Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.
- Misi 7: Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga.
- Misi 8: Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital.
- Misi 9: Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah adalah misi 3, yaitu: **“Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan”** dan misi 5, yaitu **“Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan”**.

## 1.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

### a. Tujuan

Tujuan yang diamanatkan dalam Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021 – 2026 kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah adalah : Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Ketimpangan Pendapatan masyarakat pada Kawasan Transmigrasi . Tujuan ini kemudian

ejawantahkan pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Tengah 2021 – 2026 sebagai tujuan perangkat daerah yaitu : Meningkatkan angka pencari kerja terdaftar yang bekerja, Meningkatkan perlindungan pekerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama dan Menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan warga unit pemukiman transmigrasi (UPT) Bina. Tujuan ini menjadi spirit pencapaian yang dituangkan dalam rencana kerja setiap tahun pada periode Renstra 2021 – 2026.

#### **b. Sasaran**

Sasaran pencapaian rencana kerja sebagaimana yang telah diamankan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Tengah 2021 – 2026 adalah :

1. Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
2. Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
3. Meningkatnya kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan lingkungan kerja dan;
4. Meningkatnya nilai pendapatan masyarakat unit pemukiman transmigrasi (UPT) Bina.

Dalam upaya memaksimalkan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Tengah, maka penyusunan rencana kerja hendaknya dielaborasi secara berkesinambungan sebagaimana digambarkan pada tabel 3.1. berikut ini.



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah**

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 07 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah laporan penatausahaan dan verifikasi keuangan yang dihasilkan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Laporan		250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			300,000,000	
2 07 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan AkuntansiSKPD		Jumlah laporan koordinasidan pelaksanaan akuntansi perangkat daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan		250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			350,000,000	
2 07 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuanganakhir tahun perangkat daerah yang tersusun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			125,000,000	
2 07 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah laporanbahan tanggapanpemeriksaan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			65,000,000	
2 07 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		Jumlah laporanberkala keuanganperangkat daerahyangtersusun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18 Laporan		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			125,000,000	
<b>2 07 01 1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>								<b>284,417,400</b>				<b>322,500,000</b>	
2 07 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan KebutuhanBarang Milik Daerah SKPD		Jumlah laporan perencanaan kebutuhan barang milik daerah yangtersusun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Laporan		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			55,000,000	
2 07 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah padaSKPD		Jumlah laporan rekonsiliasi barang milikdaerah pada SKPD yangtersusun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Laporan		234,417,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			267,500,000	
<b>2 07 01 1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								<b>100,000,000</b>				<b>175,000,000</b>	
2 07 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah pegawai /ASN yang telahm engikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 Orang		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			175,000,000	
<b>2 07 01 1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>630,000,000</b>				<b>770,000,000</b>	
2 07 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		Jumlah komponen instalasi listrik /peneranganbangunan		Semua Kab/Kota, Semua		20 Buah		80,000,000	Dana Transfer Umum-			95,000,000	



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah**

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Bangunan Kantor		kantor yang diadakan		Kecamatan, Semua Kelurahan						Dana Alokasi Umum			
2 07 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Jenis		250,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			275,000,000
2 07 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		100,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			175,000,000
2 07 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah intensitas fasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasidan konsultasi SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Kali		200,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			225,000,000
<b>2 07 01 1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>1,400,000,000</b>					<b>2,420,000,000</b>
2 07 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya		Jumlah unit peralatan da mesin yang diadakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		200,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			220,000,000
2 07 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya		Jumlah unit saranadan prasarana gedung kantoratau bangunan lainnya yang diadakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		1,200,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			2,200,000,000
<b>2 07 01 1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>579,757,517</b>					<b>687,500,000</b>
2 07 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik		Waktu fasilitasi penyediaan jasa komunikasi,sumber dayaair dan listrik		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		429,757,517		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			420,000,000
2 07 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				3 Jenis		150,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			267,500,000
<b>2 07 01 1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>717,500,000</b>					<b>810,000,000</b>
2 07 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang difasilitasi penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Unit		140,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			160,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah**

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Pemeliharaan dan Pajaknya											
2 07 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang difasilitasi penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya.		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60 Unit		390,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			425,000,000
2 07 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan danmesin lainnya yang terpelihara		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Unit		187,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			225,000,000
<b>2 07 02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>								<b>165,420,079</b>					<b>205,000,000</b>
<b>2 07 02 1.01</b>	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>								<b>165,420,079</b>					<b>205,000,000</b>
2 07 02 1.01 01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga kerjamakro yang telah disusun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Dok		100,420,079		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			120,000,000
2 07 02 1.01 02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga kerjamikro yang telah disusun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dok		65,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			85,000,000
<b>2 07 03</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>								<b>1,283,296,125</b>					<b>1,450,600,000</b>
<b>2 07 03 1.01</b>	<b>Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi</b>								<b>1,053,296,125</b>					<b>1,095,600,000</b>
2 07 03 1.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi		Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan pemagangan dalam negeri/ kompetensi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Orang		850,320,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			873,600,000
2 07 03 1.01 02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah instruktur latihankerja dan produktivitas yang ditingkatkan kapasitasnya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 Orang		202,976,125		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			222,000,000
<b>2 07 03 1.02</b>	<b>Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja</b>								<b>160,000,000</b>					<b>180,000,000</b>
2 07 03 1.02 01	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang terakreditasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Unit/LPK		160,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			180,000,000
<b>2 07 03 1.04</b>	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi</b>								<b>70,000,000</b>					<b>175,000,000</b>

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah**

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 07 03 1.04 01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		Jumlah dokumen pengukuran produktivitas yang disusun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dok		70,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			175,000,000	
<b>2 07 04</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>								<b>3,368,615,618</b>				<b>3,730,000,000</b>	
<b>2 07 04 1.01</b>	<b>Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>2,333,615,618</b>				<b>2,410,000,000</b>	
2 07 04 1.01 01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja		Jumlah SDM aparat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam melakukan pelayanan antar kerja		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Orang		300,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			335,000,000	
2 07 04 1.01 03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Orang		130,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			145,000,000	
2 07 04 1.01 04	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)		Jumlah layanan nantar kerja antar daerah (AKAD) dan antar kerja lokal (AKL) kabupaten yang dibina operasionalisasinya.		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13 Kab/Kota		120,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			130,000,000	
2 07 04 1.01 05	Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah pencari kerja yang difasilitasi penempatan kerja melalui mekanisme perluasan kesempatan kerja (penciptaan wirausaha baru, padat karya infrastruktur, padat Karya produktif).		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		225 Orang		1,783,615,618	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			1,800,000,000	
<b>2 07 04 1.02</b>	<b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>130,000,000</b>				<b>145,000,000</b>	
2 07 04 1.02 02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS		Jumlah kab / kota yang terpantau operasional LPTKS nya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13 Kab/Kota		130,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			145,000,000	
<b>2 07 04 1.03</b>	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>								<b>490,000,000</b>				<b>645,000,000</b>	
2 07 04 1.03 01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah sistem informasi pasar kerja online yang terfasilitasi operasional nya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13 Kab/Kota		30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			45,000,000	
2 07 04 1.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah pencari kerja yang difasilitasi penempatannya melalui pasar kerja online		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua		100 Orang		110,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi			135,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah**

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kelurahan					Umum				
2 07 04 1.03 03	Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah pencari kerja yang difasilitasi penempatannya melalui bursa kerja		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 Orang			350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			465,000,000	
<b>2 07 04 1.04</b>	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi</b>								<b>315,000,000</b>				<b>405,000,000</b>	
2 07 04 1.04 01	Peningkatan Pelindungan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Jumlah calon pekerja migran Indonesia yang diberikan pelatihan / bimbingan konsultasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Orang			85,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100,000,000	
2 07 04 1.04 02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik		Jumlah Perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang difasilitasi perizinan pendirian cabang		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Perusahaan			30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			45,000,000	
2 07 04 1.04 03	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran		Jumlah Jejaring mitra koordinasi pelayanan keberangkatan dan kepulangan pekerja migran Indonesia		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Insransi/ Lembaga			100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			125,000,000	
2 07 04 1.04 04	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan		Jumlah PMI purna penempatan yang mendapatkan pemberdayaan kapasitas.		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang			100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			135,000,000	
<b>2 07 04 1.05</b>	<b>Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>								<b>100,000,000</b>				<b>125,000,000</b>	
2 07 04 1.05 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah laporan koordinasi pengesahan RPTKA		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dok			100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			125,000,000	
<b>2 07 05</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>								<b>347,584,930</b>				<b>350,000,000</b>	
<b>2 07 05 1.01</b>	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota</b>								<b>90,000,000</b>				<b>130,000,000</b>	
2 07 05 1.01 01	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial		Jumlah perusahaan yang difasilitasi bimbingan teknis penyusunan Peraturan Perusahaan (PP)		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Perusahaan			90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			130,000,000	
<b>2 07 05 1.02</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi</b>								<b>150,000,000</b>				<b>90,000,000</b>	
2 07 05 1.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan		Jumlah perusahaan yang mendapatkan sosialisasi /pendataan pengingnyasarana hubungan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	50 Perusahaan			50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana			90,000,000	



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah**

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 32 02 1.01 04	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		Jumlah UPT Bina yang difasilitasi penyelesaian permasalahan sertifikasi lahannya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 UPT			149,260,528	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			165,700,000
<b>3 32 03</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>									<b>1,056,976,831</b>				<b>1,105,000,000</b>
<b>3 32 03 1.01</b>	<b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>									<b>1,056,976,831</b>				<b>1,105,000,000</b>
3 32 03 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1(Satu) Daerah Provinsi		Jumlah laporan kesepakatan dan kesepahaman kerjasama pembangunan transmigrasi antar pemerintah kabupaten yangtelah difasilitasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan			50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			65,000,000
3 32 03 1.01 02	Penyiapan Lingkungan Hutan Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran		Jumlah sarana prasaranadasar yang dibangun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Unit			856,976,831	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			850,000,000
3 32 03 1.01 04	Pemindahan dan Penempatan Transmigranyang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi		Jumlah warga transmigrasi penempatan setempat (TPS) yang baru ditempatkan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 KK			50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			65,000,000
3 32 03 1.01 07	Penyesuaian LingkunganBaru Transmigran di Kawasan Transmigrasi		Jumlah warga transmigrasiyang baru ditempatkan mendapatkan pelatihan penyesuaian integrasisosial		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 KK			100,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			125,000,000
<b>3 32 04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>									<b>805,485,541</b>				<b>890,500,000</b>
<b>3 32 04 1.01</b>	<b>Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan</b>									<b>805,485,541</b>				<b>890,500,000</b>
3 32 04 1.01 01	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman		Jumlah UPT Bina yang difasilitasi peningkatan kualitas SDM nya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 UPT			400,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			440,000,000
3 32 04 1.01 02	Penguatan InfrastrukturSosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman		Jumlah UPT bina yang difasilitasi penguatan infrastruktur Sosial nya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 UPT			405,485,541	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			450,500,000
<b>TOTAL</b>										<b>34,505,815,764</b>				<b>38,519,127,517</b>



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0001 UPT.BLK-PP

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 07 03 1.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		160 Orang		800,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			900,000,000	
2 07 03 1.01 02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah dokumen / laporan hasil Training Need Analisis yang dilaksanakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Laporan		200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			250,000,000	
<b>2 07 03 1.03</b>	<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah</b>								<b>400,000,000</b>				<b>450,000,000</b>	
2 07 03 1.03 01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah		Jumlah UMKM yang mendapatkan bimbingan konsultasi peningkatan produktivitas				30 UMKM		400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			450,000,000	
<b>2 07 03 1.04</b>	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi</b>								<b>600,000,000</b>				<b>680,000,000</b>	
2 07 03 1.04 01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		Jumlah dokumen pengukuran produktivitas yang disusun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		600,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			680,000,000	
<b>TOTAL</b>									<b>2,900,000,000</b>				<b>3,397,000,000</b>	







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 07 06 1.01 02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan		Jumlah perusahaan yangtelah mendapatkan bimbingan penyuluhan hukum ketenagakerjaan terkait norma ketenagakerjaan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				78,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				100,000,000
<b>TOTAL</b>									<b>1,056,000,000</b>					<b>1,220,000,000</b>

RENCANA KERJA  
DAN PENDANAAN  
PERANGKAT  
DAERAH

BAB 4

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN**  
**TAHUN 2023**

Rumusan program dan kegiatan beserta indikator, target dan pagu indikatif tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan RKPD yang ditetapkan. Rumusan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Tengah untuk tahun 2023 terdiri target indikator kinerja program tahun 2023 yang dituangkan pada tabel 4.1 dibawah ini .

Tabel 4.1  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Periode 2023 PERUBAHAN

Tujuan	Sasaran	Kode			Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
		Prog.	Keg.	Sub Keg.				Tahun 2023	Rp		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
<b>Sekretariat dan Bidang Teknis Dinas</b>								64.593.316.920,00			
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah									SEKRETARIAT DINAS		
					Indeks Reformasi Perangkat Daerah Disnakertrans	63,05		66,50	SEKRETARIAT DINAS	Sulawesi Tengah	
			2.07.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67,00		74,00		Sulawesi Tengah
						Indeks Kepuasan Masyarakat	76,61		85,00		Sulawesi Tengah
						Persentase ketercapaian realisasi anggaran			98,25		Sulawesi Tengah
			2.07.01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah yang tersusun	4,00		4,00	362.669.200,00	Sulawesi Tengah
						2. Jumlah laporan evaluasi capaian kinerja yang tersusun	4,00		4,00		Sulawesi Tengah
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67,00		74,00		Sulawesi Tengah
		2.07.01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun	1,00		1,00	162.648.000,00	Sulawesi Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode			Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
		Prog.	Keg.	Sub Keg.					Tahun 2023			
									Target	Rp		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		
		2.07.01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,00		1,00	5.923.300,00		Sulawesi Tengah
		2.07.01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA perangkat daerah tersusun	1,00		1,00	6.205.700,00		Sulawesi Tengah
		2.07.01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1,00		1,00	5.751.450,00		Sulawesi Tengah
		2.07.01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1,00		1,00	5.571.900,00		Sulawesi Tengah
		2.07.01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Daerah	12,00		5,00	176.568.850,00		Sulawesi Tengah
		2.07.01	1.02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>1. Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah</i>	<i>8,00</i>		<i>7,00</i>			Sulawesi Tengah
						<i>2. Jumlah Laporan penatalaksanaan keuangan perangkat daerah</i>	<i>8,00</i>		<i>7,00</i>	<i>29.305.773.631,00</i>		Sulawesi Tengah
		2.07.01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12,00		165,00	27.143.961.631,00		Sulawesi Tengah
		2.07.01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4,00		4,00	1.983.800.000,00		Sulawesi Tengah
		2.07.01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1,00		1,00	104.400.000,00		Sulawesi Tengah
		2.07.01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1,00		1,00	20.402.500,00		Sulawesi Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode			Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
		Prog.	Keg.	Sub Keg.					Tahun 2023				
									Target	Rp			
1	2	3			4	5		6		7	8	9	10
		2.07.01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,00		2,00	28.515.500,00		Sulawesi Tengah	
		2.07.01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1,00		1,00	12.307.000,00		Sulawesi Tengah	
		2.07.01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18,00		18,00	12.387.000,00		Sulawesi Tengah	
		2.07.01	1.03		<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>1. Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	6,00		2,00	254.574.000,00		Sulawesi Tengah	
		2.07.01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2,00		2,00	50.000.000,00		Sulawesi Tengah	
		2.07.01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,00		2,00	204.574.000,00		Sulawesi Tengah	
		2.07.01	1.05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>1. Jumlah laporan layanan administrasi dan ketatausahaan kepegawaian perangkat daerah</i>	9,00		3,00	62.861.600,00		Sulawesi Tengah	
						<i>2. Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	76,61		85,00			Sulawesi Tengah	
		2.07.01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4,00		12,00	44.300.000,00		Sulawesi Tengah	
		2.07.01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang telah mengikuti sosialisasi peraturan / perundang undangan	30,00		30,00	14.061.600,00		Sulawesi Tengah	
		2.07.01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai / ASN yang telah mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan			20,00	4.500.000,00		Sulawesi Tengah	
		2.07.01	1.06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>1. Jumlah laporan layanan administrasi umum perangkat daerah</i>	11,00		4,00	153.281.817,00		Sulawesi Tengah	



Tujuan	Sasaran	Kode			Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
		Prog.	Keg.	Sub Keg.					Tahun 2023			
									Target	Rp		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		
		2.07.01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20,00		5,00	28.284.687,00		Sulawesi Tengah
		2.07.01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			6,00	66.794.330,00		Sulawesi Tengah
		2.07.01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12,00		12,00	23.337.800,00		Sulawesi Tengah
		2.07.01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4,00		6,00	34.865.000,00		Sulawesi Tengah
		2.07.01	1.07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah pengadaan barang penunjang urusan pemerintah daerah</i>	4,00		8,00	1.289.115.617,00		Sulawesi Tengah
		2.07.01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin yang diadakan			1,00	455.675.617,00		Sulawesi Tengah
		2.07.01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan			3,00	833.440.000,00		Sulawesi Tengah
		2.07.01	1.08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah laporan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan</i>		4	2,00	546.828.246,00		Sulawesi Tengah
		2.07.01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00		12,00	382.837.746,00		Sulawesi Tengah
		2.07.01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3,00		3,00	163.990.500,00		Sulawesi Tengah
		2.07.01	1.09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah barang milik daerah yang difasilitasi pemeliharaannya</i>	7,00		7,00	606.750.000,00		Sulawesi Tengah
		2.07.01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	60,00		60,00	124.660.000,00		Sulawesi Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode			Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
		Prog.	Keg.	Sub Keg.					Tahun 2023			
									Target	Rp		
1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	
		2.07.01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10,00		10,00	344.120.000,00		Sulawesi Tengah
		2.07.01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara			2,00	47.970.000,00		Sulawesi Tengah
		2.07.01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara			1,00	90.000.000,00		Sulawesi Tengah
Meningkatkan angka pencari kerja terdaftar yang bekerja						1. Persentase rasio pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	9,87		10,74			Sulawesi Tengah
	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja					Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi			51,32			Sulawesi Tengah
						Persentase pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang diberi bimbingan konsultasi			19,00			Sulawesi Tengah
		2 07 02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	0,00	132.669.975	27,00	165.420.079,00		Sulawesi Tengah
		2 07 02	1.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga kerja daerah yang telah disusun	3,00		1,00	216.320.000,00		Sulawesi Tengah
						Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja sektoral yang telah disusun			0,00			Sulawesi Tengah
		2 07 02	1.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga kerja makro yang telah disusun			3,00	163.170.000,00	BIDANG P5TK	Sulawesi Tengah
		2 07 02	1.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro			13,00	53.150.000,00	BIDANG P5TK	Sulawesi Tengah
		2 07 03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	47,00	10.338.187.975	51,32	2.086.500.000,00		Sulawesi Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode			Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
		Prog.	Keg.	Sub Keg.				Tahun 2023			
								Target	Rp		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
					Tingkat produktivitas tenaga kerja di Sulawesi Tengah	0	-	26,32	-		Sulawesi Tengah
		2 07 03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan kerja tahun n		250,00	1.900.000.000,00		Sulawesi Tengah
		2 07 03	1.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi		250,00	1.350.000.000,00	BIDANG P5TK / BLKPP	Sulawesi Tengah
		2 07 03	1.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n		2,00	550.000.000,00	BIDANG P5TK	Sulawesi Tengah
		2 07 03	1.02		Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang telah terakreditasi		6,00	166.500.000,00	BIDANG P5TK	Sulawesi Tengah
		2 07 03	1.02	01	Survei dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang terakreditasi		15,00	166.500.000,00	BIDANG P5TK	Sulawesi Tengah
		2 07 03	1.04		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen pengukuran produktivitas tenaga kerja yang disusun		1,00	20.000.000,00		Sulawesi Tengah
		2 07 03	1.04	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah dokumen pengukuran produktivitas yang disusun		1,00	20.000.000,00	BLKPP	Sulawesi Tengah
	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja					Persentase pencari kerja terdaftar yang difasilitasi penempatannya	10	10,74			Sulawesi Tengah
		2 07 04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terdaftar yang difasilitasi penempatannya	10	642.572.395	10,74	19.165.025.205,00	Sulawesi Tengah
						Persentase fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui penciptaan / perluasan kesempatan kerja	0.030		0,037		Sulawesi Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode			Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
		Prog.	Keg.	Sub Keg.				Tahun 2023				
								Target	Rp			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		
		2 07 04	1.01		Pelayanan antar kerja lintas daerah Kab./Kota	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui pelayanan antar kerja lintas Kab./Kota			50 org.	18.597.968.805,00		Sulawesi Tengah
		2 07 04	1.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya			26,00	93.739.350,00	BIDANG P5TK	Sulawesi Tengah
		2 07 04	1.01	03	Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan			40,00	98.177.250,00	BIDANG P5TK	Sulawesi Tengah
		2 07 04	1.01	04	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL			26,00	50.207.000,00	BIDANG P5TK	Sulawesi Tengah
		2 07 04	1.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja			900,00	18.355.845.205,00	BIDANG P5TK	Sulawesi Tengah
		2 07 04	1.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LPTKS yang difasilitasi perijinannya			4,00	12.350.000,00		Sulawesi Tengah
		2 07 04	1.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku			4,00	12.350.000,00	BIDANG P5TK	Sulawesi Tengah
		2 07 04	1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari kerja yang difasilitasi penempatannya melalui informasi pasar kerja			50 org.	281.239.000,00		Sulawesi Tengah
		2 07 04	1.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online			1,00	35.620.000,00	BIDANG P5TK	Sulawesi Tengah
		2 07 04	1.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)			350,00	118.159.300,00	BIDANG P5TK	Sulawesi Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode			Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
		Prog.	Keg.	Sub Keg.					Tahun 2023			
									Target	Rp		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		
		2 07 04	1.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja			50 org.	127.459.700,00	BIDANG P5TK	Sulawesi Tengah
		2 07 04	1.04		<i>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah Pekerja Migran (Pra dan Purna) penempatan yang mendapatkan fasilitasi pelindungan</i>			10,00	239.457.000,00		Sulawesi Tengah
		2 07 04	1.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya			16,00	51.448.500,00	BIDANG P5TK	Sulawesi Tengah
		2 07 04	1.04	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik	Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online elektronik			4,00	43.083.500,00	BIDANG P5TK	Sulawesi Tengah
		2 07 04	1.04	03	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA			50 org.	112.432.000,00	BIDANG P5TK	Sulawesi Tengah
		2 07 04	1.04	04	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan			20,00	32.493.000,00	BIDANG P5TK	Sulawesi Tengah
		2 07 04	1.05		<i>Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah RPTKA perpanjangan yang di fasilitasi pengesahannya</i>			1,00	34.010.400,00		Sulawesi Tengah
		2 07 04	1.05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA			30,00	34.010.400,00	BIDANG P5TK	Sulawesi Tengah
Meningkatkan perlindungan pekerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama						Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama (PB)	65,00		64,00			Sulawesi Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode			Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
		Prog.	Keg.	Sub Keg.					Tahun 2023			
									Target	Rp		
1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	
	Meningkatnya kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan lingkungan kerja					Persentase pekerja / buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	64		98,30			Sulawesi Tengah
		2 07 05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama (PB)	65,00	659.703.200	64,00	738.437.250,00		Sulawesi Tengah
		2 07 05	1.01		<i>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan (PP) yang disahkan dan perjanjian kerja bersama (PKB) yang telah didaftarkan</i>			100,00	74.999.800,00		Sulawesi Tengah
		2 07 05	1.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online			100,00	74.999.800,00	BIDANG PHI WASNAKER	Sulawesi Tengah
		2 07 05	1.02		<i>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(satu) Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah peserta forum konsultasi / koordinasi antara pemerintah - serikat pekerja dan pengusaha yang dilaksanakan sebagai upaya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemogokan dan konflik lainnya.</i>			100,00	369.437.500,00		Sulawesi Tengah
						<i>Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun</i>		175	165,00			Sulawesi Tengah
						<i>Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah</i>		78	84,00			Sulawesi Tengah
		2 07 05	1.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah			50,00	100.000.000,00	BIDANG PHI WASNAKER	Sulawesi Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode			Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
		Prog.	Keg.	Sub Keg.					Tahun 2023			
									Target	Rp		
1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	
		2 07 05	1.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina			30,00	269.437.500,00	BIDANG PHI WASNAKER	Sulawesi Tengah
		2 07 05	1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Persentase peningkatan kesejahteraan/upah kerja			7,00	293.999.950,00		Sulawesi Tengah
						Persentase jumlah perusahaan yang mengikuti jamsostek			82,50			Sulawesi Tengah
		2 07 05	1.03	01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP			1,00	293.999.950,00	BIDANG PHI WASNAKER	Sulawesi Tengah
		2 07 06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase jumlah perusahaan yang diawasi	54,65	913.679.625	27,00	340.000.000,00		Sulawesi Tengah
		2 07 06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang diawasi dari jumlah perusahaan dalam WLKP Online			27,00	340.000.000,00		Sulawesi Tengah
		2 07 06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)			200,00	215.000.000,00	UPT WASNAKER WIL I dan UPT WASNAKER WIL II	Sulawesi Tengah
		2 07 06	1.01	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3			250,00	125.000.000,00	BIDANG PHI WASNAKER, UPT WASNAKER WIL I dan UPT WASNAKER WIL II	Sulawesi Tengah
						2. Jumlah perusahaan yang telah diuji peralatannya (uji peraltan keselamatan dan produksi)					BIDANG PHI WASNAKER, UPT WASNAKER WIL I dan UPT WASNAKER WIL II	Sulawesi Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode			Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
		Prog.	Keg.	Sub Keg.					Tahun 2023			
									Target	Rp		
1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	
Menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan warga unit pemukiman transmigrasi (UPT) Bina					Persentase Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) bina yang tingkat pendapatan warganya pada tahap pemantapan			50,00				Sulawesi Tengah
Meningkatnya nilai pendapatan masyarakat unit pemukiman transmigrasi (UPT) Bina					Nilai rata rata pendapatan warga transmigrasi pada Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Bina (ekivalen Kg beras / KK tahun)			2.150,00				Sulawesi Tengah
		3 32 02			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang tersusun	60,00	771.863.150	69,00	408.831.065,00		Sulawesi Tengah
		3 32 02	1.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase kawasan / UPT bina transmigrasi yang difasilitasi sertifikasinya			4,00	408.831.065,00		Sulawesi Tengah
		3 32 02	1.01	01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain			2,00	105.651.465,00	BIDANG PKT	Sulawesi Tengah
		3 32 02	1.01	02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi			2,00	60.349.775,00	BIDANG PKT	Sulawesi Tengah
		3 32 02	1.01	03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi			300,00	166.329.825,00	BIDANG PKT	Sulawesi Tengah
		3 32 02	1.01	04	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi			1,00	76.500.000,00	BIDANG PKT	Sulawesi Tengah



Tujuan	Sasaran	Kode			Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
		Prog.	Keg.	Sub Keg.					Tahun 2023			
									Target	Rp		
1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	
		3 32 03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase satuan permukiman / kawasan transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	33,35	1.038.731.200	50,00	7.225.000.000,00		Sulawesi Tengah
		3 32 03	1.01		<i>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah penduduk yang ditata penyebarannya / ditempatkan dalam satu kawasan transmigrasi</i>			200,00	7.225.000.000,00		Sulawesi Tengah
		3 32 03	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			2,00	150.000.000,00	BIDANG PKTP3	Sulawesi Tengah
		3 32 03	1.01	02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)			2,00	6.865.000.000,00	BIDANG PKTP3	Sulawesi Tengah
		3 32 03	1.01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan			20,00	85.000.000,00	BIDANG PKTP3	Sulawesi Tengah
		3 32 03	1.01	07	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi			20,00	125.000.000,00	BIDANG PKTP3	Sulawesi Tengah
		3 32 04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase satuan permukiman yang berhasil dikembangkan pada kategori pemantapan	35,00	1.976.489.207	50,00	1.882.249.210,00		Sulawesi Tengah
		3 32 04	1.01		<i>Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan</i>	<i>Jumlah satuan permukiman yang telah berada pada kategori pemantapan</i>			3,00	1.882.249.210,00		Sulawesi Tengah
		3 32 04	1.01	01	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina			450,00	264.749.890,00	BIDANG PKTDT	Sulawesi Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode			Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
		Prog.	Keg.	Sub Keg.				Tahun 2023			
								Target	Rp		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
		3 32 04	1.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemanjatan Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan		6,00	1.617.499.320,00	BIDANG PKTDT	Sulawesi Tengah
UPT BLKPP								1.089.993.823,00			Sulawesi Tengah
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		66,50	189.594.050,00	UPT BLKPP	Sulawesi Tengah
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan layanan administrasi umum perangkat daerah		5,00	19.901.250,00	UPT BLKPP	Sulawesi Tengah
			1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6,00	6,00	14.997.400,00	UPT BLKPP	Sulawesi Tengah
			1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4,00	6,00	4.903.850,00	UPT BLKPP	Sulawesi Tengah
					<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah pengadaan barang penunjang urusan pemerintah daerah</i>	4,00	8,00	5.500.000,00	UPT BLKPP	Sulawesi Tengah
			1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan		1,00	5.500.000,00	UPT BLKPP	Sulawesi Tengah
					<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah laporan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan</i>	2,00	2,00	58.732.800,00	UPT BLKPP	Sulawesi Tengah
			1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	12,00	58.732.800,00	UPT BLKPP	Sulawesi Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode			Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
		Prog.	Keg.	Sub Keg.					Tahun 2023			
									Target	Rp		
1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	
					<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah barang milik daerah yang difasilitasi pemeliharaannya</i>	7,00		7,00	105.460.000,00	UPT BLKPP	Sulawesi Tengah
			1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	60,00		60,00	102.250.000,00	UPT BLKPP	Sulawesi Tengah
			1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara			2,00	3.210.000,00	UPT BLKPP	Sulawesi Tengah
		2 07 03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	47,00	10.338.187.975	51,32	900.399.773,00	UPT BLKPP	Sulawesi Tengah
						Tingkat produktivitas tenaga kerja di Sulawesi Tengah	0		26,32	-	UPT BLKPP	Sulawesi Tengah
		2 07 03	1.01		<i>Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi</i>	<i>Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan kerja tahun n</i>			250,00	550.399.823,00	UPT BLKPP	Sulawesi Tengah
		2 07 03	1.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi			250,00	550.399.823,00	UPT BLKPP	Sulawesi Tengah
		2 07 03	1..03		<i>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah</i>	<i>Tingkat pertumbuhan UMKM yang difasilitasi peningkatan produktivitasnya</i>			8,00	115.565.000,00	UPT BLKPP	Sulawesi Tengah
		2 07 03	1..03	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang mendapatkan bimbingan konsultasi peningkatan produktivitas			60,00	115.565.000,00	UPT BLKPP	Sulawesi Tengah
		2 07 03	1.04		<i>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah Dokumen pengukuran produktivitas tenaga kerja yang disusun</i>			1,00	234.434.950,00	UPT BLKPP	Sulawesi Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode			Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
		Prog.	Keg.	Sub Keg.				Tahun 2023				
								Target	Rp			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		
		2 07 03	1.04	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah dokumen pengukuran produktivitas yang disusun		1,00	234.434.950,00	UPT BLKPP	Sulawesi Tengah	
UPT WASNAKER WIL I								645.673.141,69			Sulawesi Tengah	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		66,50	183.599.463,00	UPT WASNAKER WIL I	Sulawesi Tengah	
					<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah jenis layanan administrasi umum perangkat daerah</i>		5,00	114.339.463,00	UPT WASNAKER WIL I	Sulawesi Tengah	
			1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20,00	20,00	2.560.600,00	UPT WASNAKER WIL I	Sulawesi Tengah	
			1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6,00	42.172.103,00	UPT WASNAKER WIL I	Sulawesi Tengah	
			1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		4,00	69.606.760,00	UPT WASNAKER WIL I	Sulawesi Tengah	
					<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah barang milik daerah yang difasilitasi pemeliharaannya</i>	7,00	7,00	69.260.000,00	UPT WASNAKER WIL I	Sulawesi Tengah	
			1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	60,00	60,00	50.000.000,00	UPT WASNAKER WIL I	Sulawesi Tengah	
			1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesinlainnya yangterpelihara		1,00	19.260.000,00	UPT WASNAKER WIL I	Sulawesi Tengah	
		2 07 06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase jumlah perusahaan yang diawasi	54,65	913.679.625,00	63,08	462.073.678,69	UPT WASNAKER WIL I	Sulawesi Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode			Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
		Prog.	Keg.	Sub Keg.				Tahun 2023			
								Target	Rp		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
		2 07 06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang diawasi dari jumlah perusahaan dalam WLKP Online		63,00	480.000.000,00	UPT WASNAKER WIL I	Sulawesi Tengah
		2 07 06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)		200,00	250.000.000,00	UPT WASNAKER WIL I	Sulawesi Tengah
		2 07 06	1.01	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan		40,00	230.000.000,00	UPT WASNAKER WIL I	Sulawesi Tengah
UPT WASNAKER WIL II								500.000.000,00			Sulawesi Tengah
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		66,50	231.292.000,00	UPT WASNAKER WIL II	Sulawesi Tengah
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum perangkat daerah		5,00	161.942.000,00	UPT WASNAKER WIL II	Sulawesi Tengah
			1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20,00	20,00	2.791.250,00	UPT WASNAKER WIL II	Sulawesi Tengah
			1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6,00	6,00	58.365.400,00	UPT WASNAKER WIL II	Sulawesi Tengah
			1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4,00	6,00	100.785.350,00	UPT WASNAKER WIL II	Sulawesi Tengah
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	2,00	2,00	27.660.000,00	UPT WASNAKER WIL II	Sulawesi Tengah
			1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	12,00	27.660.000,00	UPT WASNAKER WIL II	Sulawesi Tengah
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang difasilitasi pemeliharaannya	7,00	7,00	41.690.000,00	UPT WASNAKER WIL II	Sulawesi Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode			Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
		Prog.	Keg.	Sub Keg.			Target	Rp				
									6	7		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		
			1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	60,00		60,00	35.250.000,00	UPT WASNAKER WIL II	Sulawesi Tengah
			1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara			2,00	6.440.000,00	UPT WASNAKER WIL II	Sulawesi Tengah
		2 07 06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase jumlah perusahaan yang diawasi	54,65	913.679.625,00	63,08	268.708.000,00	UPT WASNAKER WIL II	Sulawesi Tengah
		2 07 06	1.01		<i>Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan</i>	<i>Persentase perusahaan yang diawasi dari jumlah perusahaan dalam WLKP Online</i>			63,00	268.708.000,00	UPT WASNAKER WIL II	Sulawesi Tengah
		2 07 06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)			200,00	135.074.000,00	UPT WASNAKER WIL II	Sulawesi Tengah
		2 07 06	1.01	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan			40,00	133.634.000,00	UPT WASNAKER WIL II	Sulawesi Tengah
		2	07	006	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Besaran Pengujian peralatan di perusahaan						
TOTAL										<b>66.828.983.884,69</b>		

PENUTUP

BAB 5

## BAB V

### PENUTUP

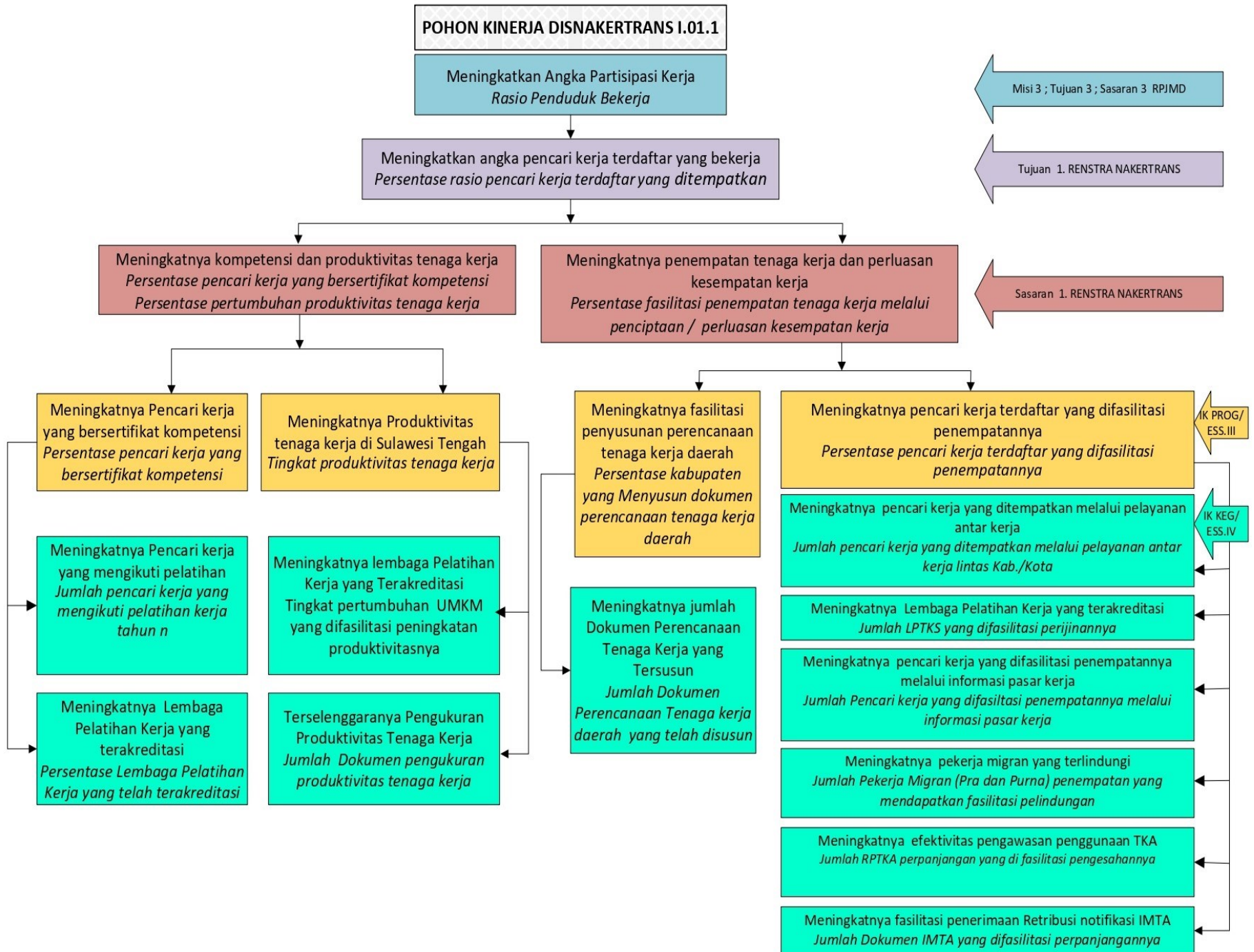
Rencana Kerja Disnakertrans Provinsi Sulawesi Tengah Perubahan Tahun 2023 telah selesai disusun sebagai bagian perwujudan dari RPJMD Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yang diimplementasikan ke dalam RENSTRA Disnakertrans Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Rencana Kerja ini merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Disnakertrans Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, sehingga seluruh kegiatan yang dilakukan Disnakertrans Provinsi Sulawesi Tengah menjadi lebih efektif, efisien dan terpadu. Dalam rangka mencapai Visi dan melaksanakan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan Pelayanan Prima bagi semua masyarakat. Penyusunan Rencana Kerja ini juga menganut azas pelaksanaan *Good Governance* pada Disnakertrans Provinsi Sulawesi Tengah, dengan diterapkannya prinsip efektif, efisien, transparan, dan *akuntable*. Kami berharap Rencana Kerja ini dapat mengantarkan Disnakertrans Provinsi Sulawesi Tengah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Sulawesi Tengah di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Rencana Kerja ini merupakan dasar monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Disnakertrans Provinsi Sulawesi Tengah yang berarti bahwa setiap kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan transparan. Dengan adanya rencana kerja ini diharapkan program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan. Oleh karena itu diharapkan Disnakertrans Provinsi Sulawesi Tengah dengan seluruh aparatur dapat melaksanakan tugas secara konsisten, kerjasama dan koordinasi, bertanggungjawab yang tinggi serta berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

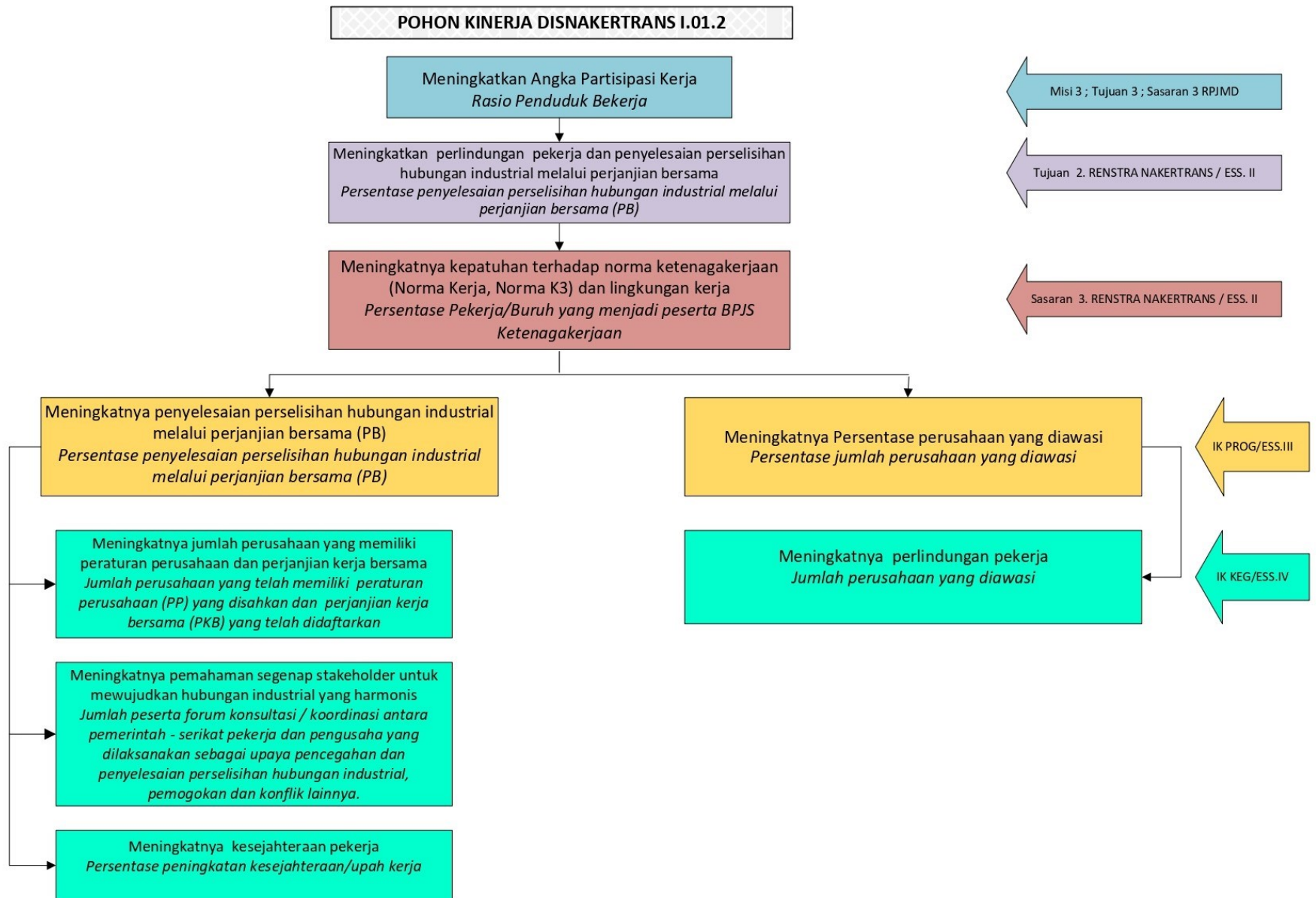
Semoga Allah SWT senantiasa meridoi segala upaya kita untuk mewujudkan masyarakat **“Sulawesi Tengah yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”**.



**LAMPIRAN POHON KINERJA DAN  
CASCADING HINGGA IKI STAF PELAKSANA  
TAHUN 2023**

**POHON KINERJA  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2023**





**POHON KINERJA DISNAKERTRANS I.20.1**

Menurunnya Tingkat Ketimpangan Pendapatan  
*Indeks Gini*

Misi 5 ; Tujuan 1 ; Sasaran 1 RPJMD

Menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan warga unit pemukiman transmigrasi (UPT) Bina  
*Persentase Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) bina yang tingkat pendapatannya pada tahap pemantapan*

Tujuan 3. RENSTRA NAKERTRANS / ESS. II

Meningkatnya nilai pendapatan masyarakat unit pemukiman transmigrasi (UPT) Bina  
*Nilai rata rata pendapatan warga transmigrasi pada Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Bina (ekivalen Kg beras / KK tahun)*

Sasaran 1. RENSTRA NAKERTRANS / ESS. II

Meningkatnya Persentase dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang tersusun  
*Persentase dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang tersusun )*

Meningkatnya Persentase satuan permukiman / kawasan transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya  
*Persentase satuan permukiman / kawasan transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya*

Meningkatnya Persentase satuan permukiman yang berhasil dikembangkan pada kategori pemantapan  
*Persentase satuan permukiman yang berhasil dikembangkan pada kategori pemantapan*

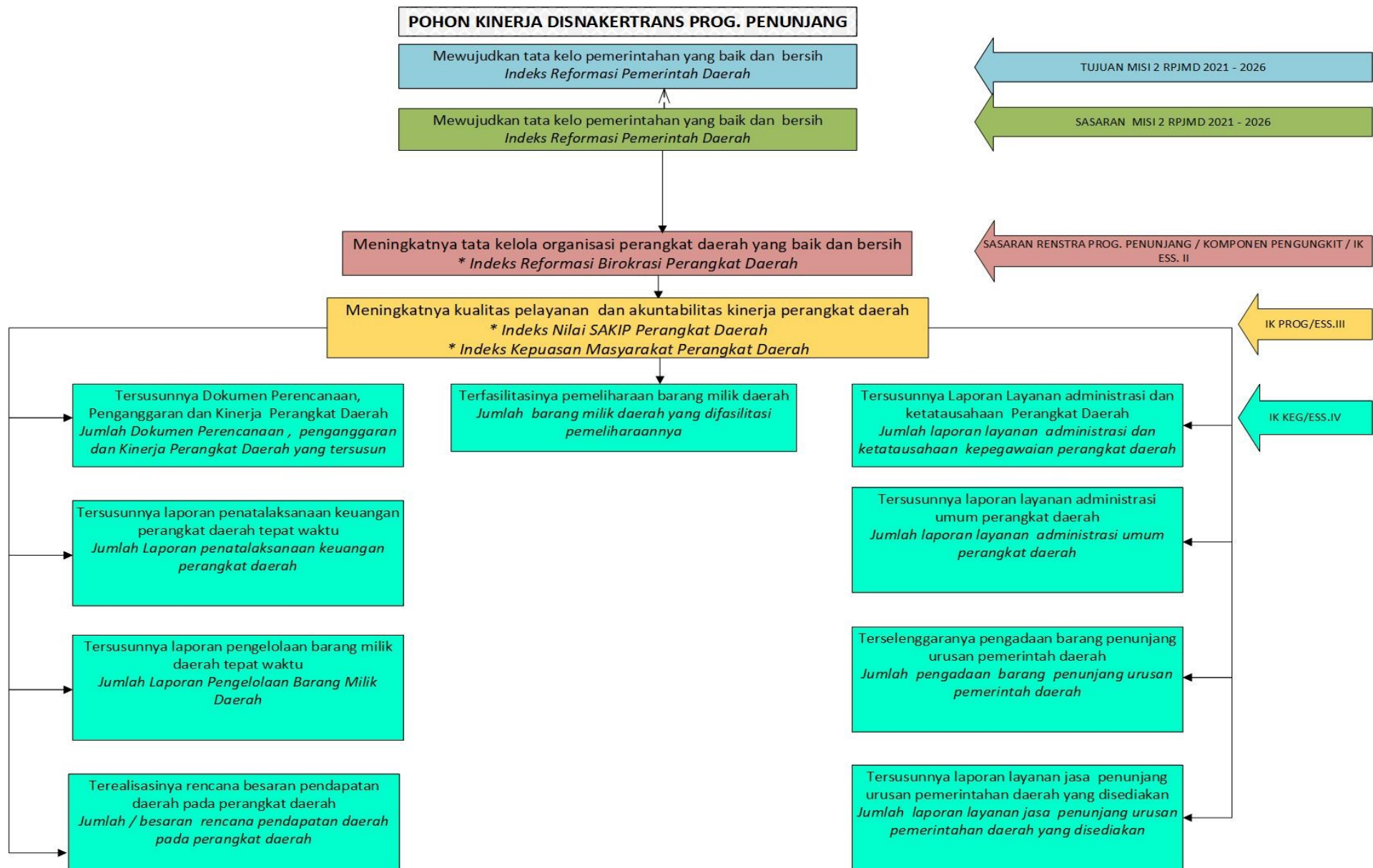
IK PROG/ESS.III

Meningkatnya Persentase kawasan / UPT bina transmigrasi yang difasilitasi sertifikasi lahannya  
*Persentase kawasan / UPT bina transmigrasi yang difasilitasi sertifikasi lahannya*

Terselenggaranya penataan persebaran penduduk yang ditempatkan dalam satu kawasan transmigrasi  
*Jumlah penduduk yang ditata persebarannya / ditempatkan dalam satu kawasan transmigrasi*

Meningkatnya Jumlah satuan permukiman yang telah berada pada kategori pemantapan  
*Jumlah satuan permukiman yang telah berada pada kategori pemantapan*

IK KEG/ESS.IV



CASCADING KINERJA  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2023

**CASCADING KINERJA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PD. DISNAKERTRANS (SEBAGAI KOMPONEN PENGUNGKIT) TERHADAP MISI 2 TUJUAN 1 RPJMD 2021 - 2026**

*" Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Penegakan Hukum dan Penegakkan Nilai Nilai Kemanusiaan dan HAM "*

Misi 2 RPJMD 2021 - 2026

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih  
**Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (66,50)**

Tujuan 1 RPJMD 2021 - 2026

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas  
**Nilai SAKIP Pemerintah Daerah (77,00)**

Sasaran RPJMD 2021 - 2026

Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Baik dan Bersih  
**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Daerah (66,50)**

TUJUAN RENSTRA PROG. PENUNJANG / KOMPONEN PENGUNGKIT / IK ESS. II

SASARAN RENSTRA PROG. PENUNJANG / KOMPONEN PENGUNGKIT / IK ESS. II

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  
**Nilai SAKIP Perangkat Daerah (74,00)**  
**Indeks Kepuasan Masyarakat (85,00)**

IK PROG/ESS.III

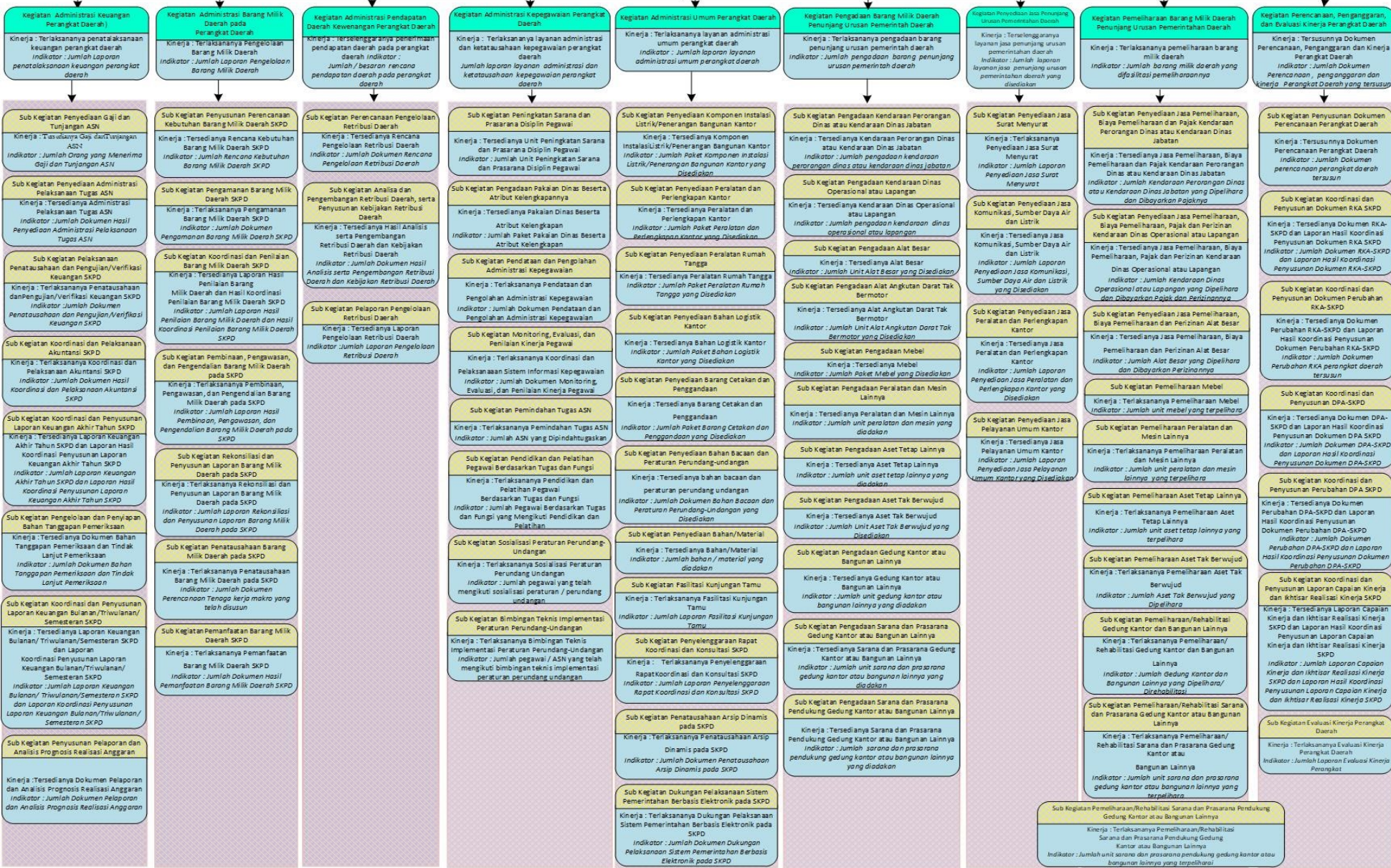
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
*Jumlah Laporan penatalaksanaan keuangan perangkat daerah*
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  
*Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah*
- Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah  
*Jumlah / besarnya rencana pendapatan daerah pada perangkat daerah*
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
*Jumlah laporan layanan administrasi dan ketatausahaan kepegawaian perangkat daerah*
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  
*Jumlah laporan layanan administrasi umum perangkat daerah*
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
*Jumlah pengadaan barang penunjang urusan pemerintah daerah*
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
*Jumlah laporan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan*
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
*Jumlah barang milik daerah yang difasilitasi pemeliharaannya*
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
*Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*

IK KEG/ESS.IV



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kinerja : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ; Indikator : Indeks Nilai SAKIP Perangkat Daerah  
Kinerja : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah ; Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah



CASCADING SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

\* Indeks Nilai SAKIP Perangkat Daerah (74,00)

\* Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (85,00)

IK PROG/ESS.III

IK KEG/ESS.IV

**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**  
Kinerja : Terlaksananya layanan administrasi dan ketatausahaan kepegawaian perangkat daerah  
Indikator : Jumlah laporan layanan administrasi dan ketatausahaan kepegawaian perangkat daerah (3 Lap)

**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**  
Kinerja : Terlaksananya layanan administrasi umum perangkat daerah  
Indikator : Jumlah laporan layanan administrasi umum perangkat daerah (4 Lap)

**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**  
Kinerja : Terselenggaranya layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah  
Indikator : Jumlah laporan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan (2 Lap)

**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**  
Kinerja : Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah  
Indikator : Jumlah barang milik daerah yang difasilitasi pemeliharannya (7 Jenis)

**Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**  
Kinerja : Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian  
Indikator : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

**Staf Pelaksana / Honorer**  
Nani Pujiastuti S.Sos., Rafikasari SP., Abdul Wahid Tagintina, S.AP., : Penyusun Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai, (1 Dokumen)  
Zulfianty : Pengumpul dan pengolah data laporan money dan penilaian kinerja pegawai (1 Laporan)

**Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**  
Kinerja : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
Indikator : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

**Staf Pelaksana / Honorer**  
Rafikasari SP., Abdul Wahid Tagintina, S.AP Sukarya S.Ap., : Penyusun rencana dan verifikasi barang kebutuhan PD, (1 Dokumen)  
Zulfianty, Ihdayat : Pembuat dan pengolah data laporan kebutuhan perlengkapan kantor (1 Laporan)

**Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**  
Kinerja : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

**Staf Pelaksana / Honorer**  
Rafikasari SP., Abdul Wahid Tagintina, S.AP Sukarya S.Ap., : Penyusun rencana dan verifikasi barang kebutuhan PD, (1 Dokumen)  
Zulfianty, Ihdayat : Pembuat dan pengolah data laporan kebutuhan perlengkapan kantor (1 Laporan)

**Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**  
Kinerja : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  
Indikator : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya

**Staf Pelaksana / Honorer**  
Rafikasari SP., Abdul Wahid Tagintina, S.AP Sukarya S.Ap., : Penyusun rencana dan verifikasi barang kebutuhan PD, (1 Dokumen)  
Zulfianty, Ihdayat : Pembuat dan pengolah data laporan kebutuhan perlengkapan kantor (1 Laporan)

**Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan**  
Kinerja : Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang telah mengikuti sosialisasi peraturan / perundang undangan

**Staf Pelaksana / Honorer**  
Nani Pujiastuti S.Sos., Sukarya S.Ap., Abdul Wahid Tagintina, S.AP., : Penyusun Dokumen Sosialisasi, (1 Dokumen)  
Zulfianty : Pengumpul dan pengolah data laporan sosialisasi pegawai (1 Laporan)

**Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**  
Kinerja : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Indikator : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

**Staf Pelaksana / Honorer**  
Nani Puji Astuti S.Sos., Rafikasari SP., Abdul Wahid Tagintina, S.AP Sukarya S.Ap., : Penyusun rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor PD, (1 Dokumen)  
Zulfianty, Ihdayat : Pembuat dan pengolah data laporan kebutuhan perlengkapan kantor (1 Laporan)

**Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**  
Kinerja : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan  
Indikator : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan

**Staf Pelaksana / Honorer**  
Rafikasari SP., Abdul Wahid Tagintina, S.AP Sukarya S.Ap., : Penyusun rencana dan verifikasi bahan cetakan dan penggandaan PD (1 Dokumen)  
Zulfianty, Ihdayat : Pembuat dan pengolah data laporan rencana kebutuhan barang cetakan (1 Laporan)

**Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**  
Kinerja : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  
Indikator : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya

**Staf Pelaksana / Honorer**  
Rafikasari SP., Abdul Wahid Tagintina, S.AP Sukarya S.Ap., : Penyusun rencana dan verifikasi barang kebutuhan PD, (1 Dokumen)  
Zulfianty, Ihdayat : Pembuat dan pengolah data laporan kebutuhan perlengkapan kantor (1 Laporan)

**Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**  
Kinerja : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan ASN yang telah mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan

**Staf Pelaksana / Honorer**  
Nani Pujiastuti S.Sos., Rafikasari SP., Abdul Wahid Tagintina, S.AP Sukarya S.Ap., : Penyusun bahan Bimtek Pegawai, (1 Dokumen)  
Zulfianty : Pengumpul dan pengolah bahan data dan laporan bimtek pegawai (1 Laporan)

**Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**  
Kinerja : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
Indikator : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**Staf Pelaksana / Honorer**  
Nani Puji Astuti S.Sos., Rafikasari SP., Abdul Wahid Tagintina, S.AP Sukarya S.Ap., : Penyusun rencana penyelenggaraan rapat koordinasi PD, (1 Dokumen)  
Zulfianty, Ihdayat : Pembuat dan pengolah data laporan penyelenggaraan rapat koordinasi (1 Laporan)

**Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**  
Kinerja : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor  
Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

**Staf Pelaksana / Honorer**  
Rafikasari SP., Abdul Wahid Tagintina, S.AP Sukarya S.Ap., : Penyusun rencana dan verifikasi barang kebutuhan PD, (1 Dokumen)  
Zulfianty, Ihdayat : Pembuat dan pengolah data laporan kebutuhan perlengkapan kantor (1 Laporan)

**Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**  
Kinerja : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Indikator : Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara

**Staf Pelaksana / Honorer**  
Rafikasari SP., Abdul Wahid Tagintina, S.AP Sukarya S.Ap., : Penyusun rencana dan verifikasi barang kebutuhan PD, (1 Dokumen)  
Zulfianty, Ihdayat : Pembuat dan pengolah data laporan kebutuhan perlengkapan kantor (1 Laporan)

**Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**  
Kinerja : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  
Indikator : Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara

**Staf Pelaksana / Honorer**  
Rafikasari SP., Abdul Wahid Tagintina, S.AP Sukarya S.Ap., : Penyusun rencana dan verifikasi barang kebutuhan PD, (1 Dokumen)  
Zulfianty, Ihdayat : Pembuat dan pengolah data laporan kebutuhan perlengkapan kantor (1 Laporan)

IK SUB KEG/ESS.IV

IKI STAF PELAKSANA / HONORER PHL

CASCADING SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

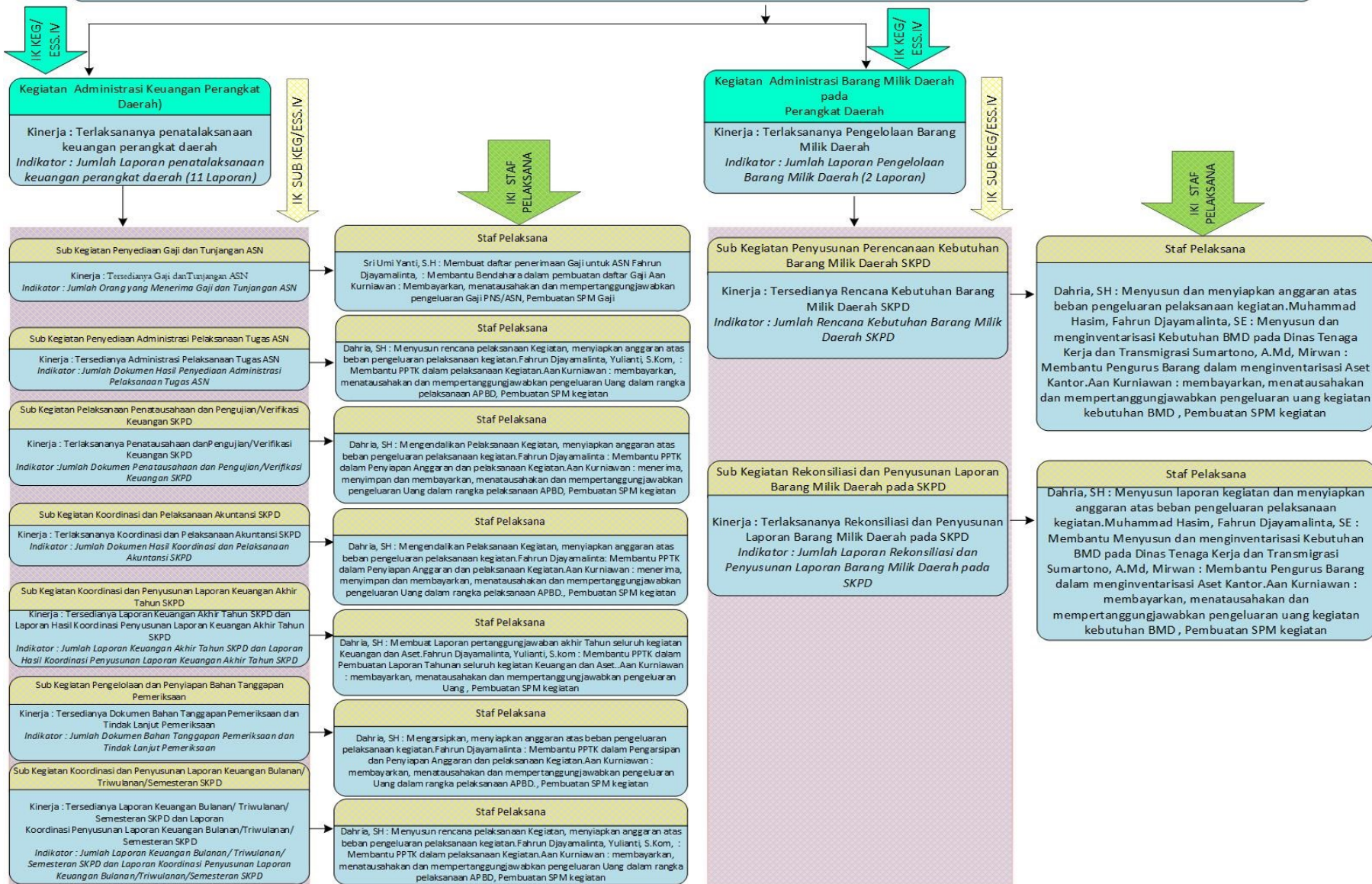
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

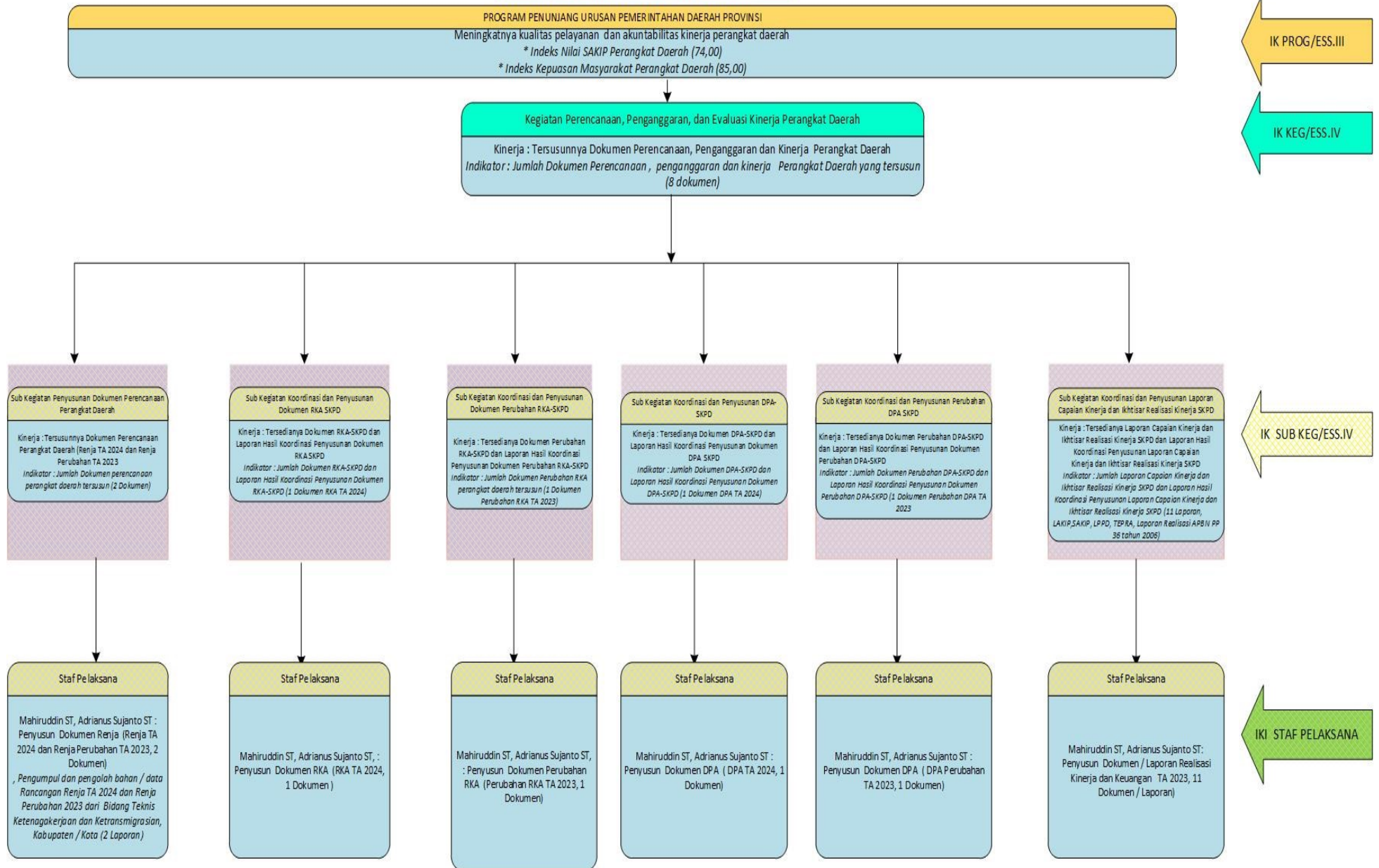
\* Indeks Nilai SAKIP Perangkat Daerah (74,00)

\* Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (85,00)

IK PROG/ESS.III



**CASCADING SUB BAGIAN PROGRAM**



**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**  
 Meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah  
 \* Indeks Nilai SAKIP Perangkat Daerah (74,00)  
 \* Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (85,00)

IK PROG/ESS.III

**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**  
 Kinerja : Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah  
 Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (8 dokumen)

IK KEG/ESS.IV

**Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**  
 Kinerja : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja TA 2024 dan Renja Perubahan TA 2023)  
 Indikator : Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun (2 Dokumen)

**Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**  
 Kinerja : Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  
 Indikator : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (1 Dokumen RKA TA 2024)

**Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**  
 Kinerja : Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  
 Indikator : Jumlah Dokumen Perubahan RKA perangkat daerah tersusun (1 Dokumen Perubahan RKA TA 2023)

**Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**  
 Kinerja : Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD  
 Indikator : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (1 Dokumen DPA TA 2024)

**Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD**  
 Kinerja : Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD  
 Indikator : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (1 Dokumen Perubahan DPA TA 2023)

**Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**  
 Kinerja : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  
 Indikator : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (11 Laporan, LAKIP, SAKIP, LPD, TEPRA, Laporan Realisasi APBDN PP 36 tahun 2006)

IK SUB KEG/ESS.IV

**Staf Pelaksana**  
 Mahiruddin ST, Adrianus Sujanto ST : Penyusun Dokumen Renja (Renja TA 2024 dan Renja Perubahan TA 2023, 2 Dokumen)  
 , Pengumpul dan pengolah bahan / data Rancangan Renja TA 2024 dan Renja Perubahan 2023 dari Bidang Teknis Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, Kabupaten / Kota (2 Laporan)

**Staf Pelaksana**  
 Mahiruddin ST, Adrianus Sujanto ST, : Penyusun Dokumen RKA (RKA TA 2024, 1 Dokumen)

**Staf Pelaksana**  
 Mahiruddin ST, Adrianus Sujanto ST, : Penyusun Dokumen Perubahan RKA (Perubahan RKA TA 2023, 1 Dokumen)

**Staf Pelaksana**  
 Mahiruddin ST, Adrianus Sujanto ST : Penyusun Dokumen DPA (DPA TA 2024, 1 Dokumen)

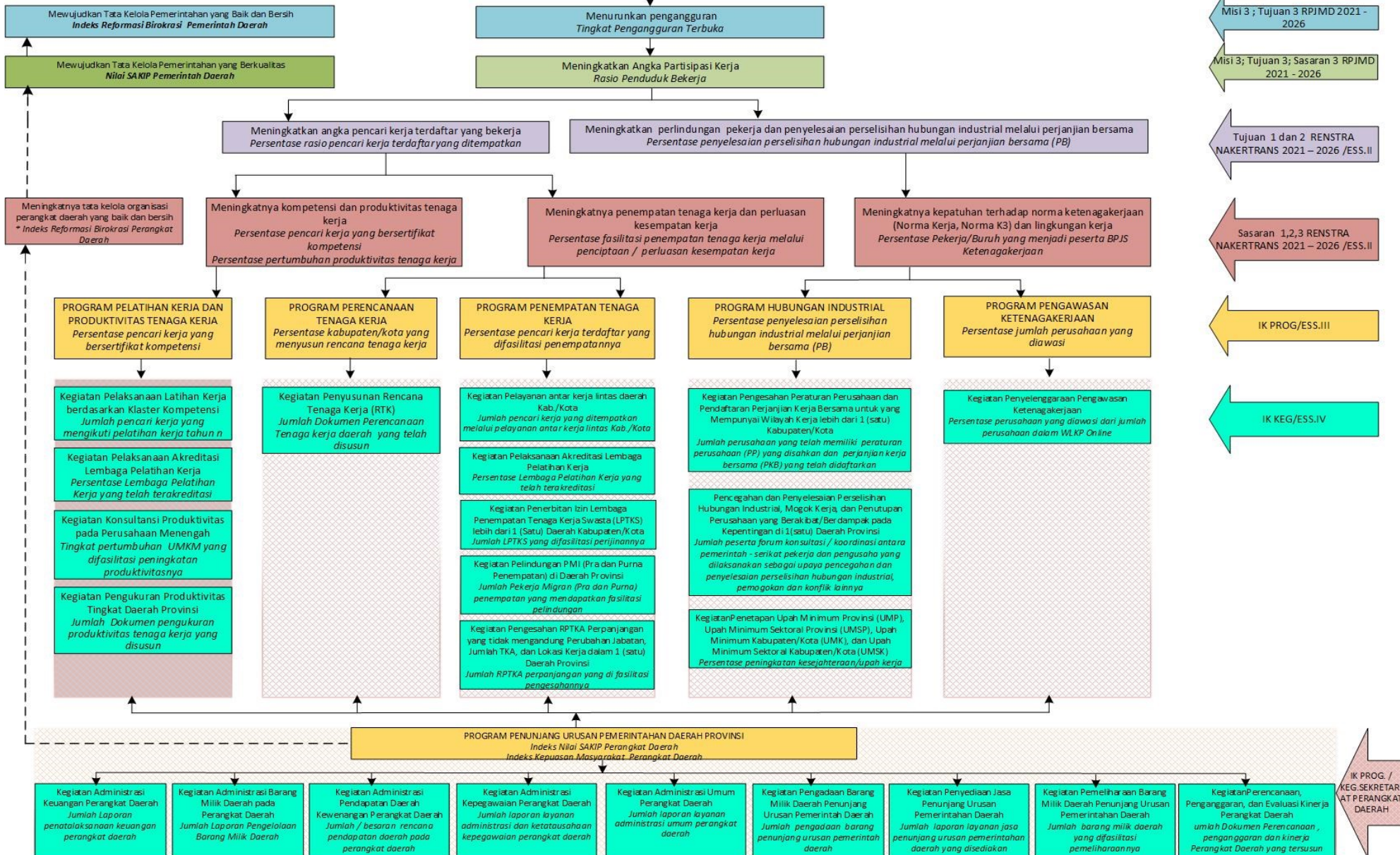
**Staf Pelaksana**  
 Mahiruddin ST, Adrianus Sujanto ST : Penyusun Dokumen DPA (DPA Perubahan TA 2023, 1 Dokumen)

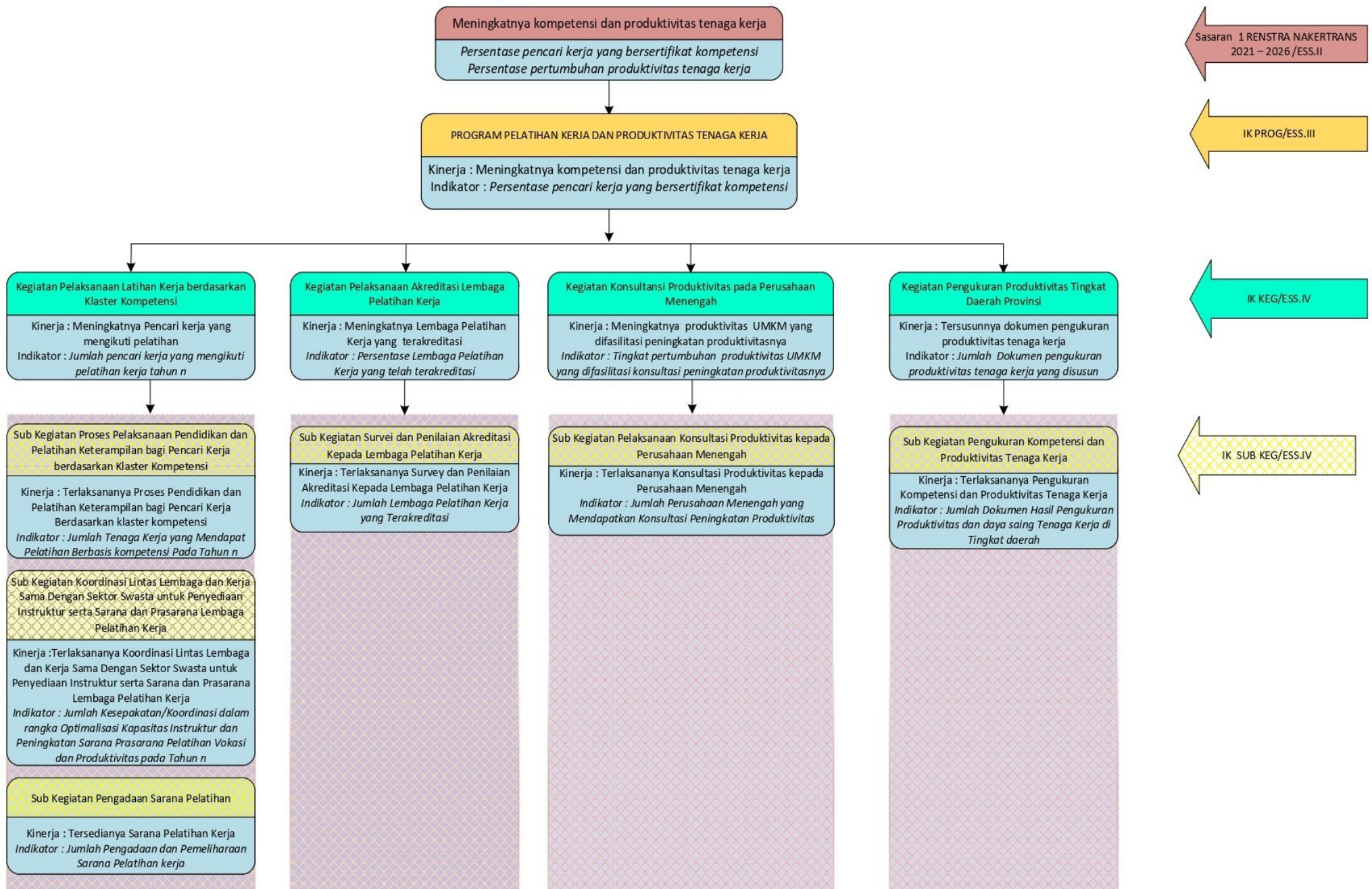
**Staf Pelaksana**  
 Mahiruddin ST, Adrianus Sujanto ST: Penyusun Dokumen / Laporan Realisasi Kinerja dan Keuangan TA 2023, 11 Dokumen / Laporan)

IKI STAF PELAKSANA

**CASCADING KINERJA DISNAKERTRANS TERHADAP MISI 3 TUJUAN 3 SASARAN 3 RPJMD 2021 - 2026**

**" Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan"**





CASCADING PELATIHAN KERJA DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja

Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi (51,32)  
 Persentase pertumbuhan produktivitas tenaga kerja (23,00)

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Kinerja : Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja  
 Indikator : Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi (51,32)

Sasaran 1 RENSTRA NAKERTRANS  
 2021 – 2026 /ESS.II

IK PROG/ESS.III

**Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi**

Kinerja : Meningkatnya Pencari kerja yang mengikuti pelatihan  
 Indikator : Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan kerja tahun n (250 Org.)

**Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja**

Kinerja : Meningkatnya Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi  
 Indikator : Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang telah terakreditasi (6 %)

**Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah**

Kinerja : Meningkatnya produktivitas UMKM yang difasilitasi peningkatan produktivitasnya  
 Indikator : Tingkat pertumbuhan produktivitas UMKM yang difasilitasi konsultasi peningkatan produktivitasnya (8 %)

**Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi**

Kinerja : Tersusunnya dokumen pengukuran produktivitas tenaga kerja  
 Indikator : Jumlah Dokumen pengukuran produktivitas tenaga kerja yang disusun (1 Dok.)

IK KEG/ESS.IV

Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi

Kinerja : Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan kluster kompetensi  
 Indikator : Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n

Sub Kegiatan Survei dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja

Kinerja : Terlaksananya Survei dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja  
 Indikator : Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi

Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah

Kinerja : Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah  
 Indikator : Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas

Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kinerja : Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja  
 Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah

IK SUB KEG/ESS.IV

Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja

Kinerja : Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja  
 Indikator : Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n

Koordinator JFT Instruktur Pelatihan/Staf Pelaksana

Suryani Yusuf, SE, MM : Fungsional Instruktur Muda  
 Nunung Kurnia Wijaya, SP : Analis Bahan Penyelenggaraan Program Pemagangan

Koordinator JFT Instruktur Pelatihan/Staf Pelaksana

Suryani Yusuf, SE, MM : Fungsional Instruktur Muda  
 Krisna Anggraini, ST, MM : Analis Bahan Peningkatan Produktivitas

Koordinator JFT Instruktur Pelatihan/Staf Pelaksana

Suryani Yusuf, SE, MM : Fungsional Instruktur Muda  
 Krisna Anggraini, ST, MM : Analis Bahan Peningkatan Produktivitas

IKI KOORDINATOR JFT INSTRUKTUR PELATIHAN STAF PELAKSANA

Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan

Kinerja : Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja  
 Indikator : Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja

Koordinator JFT Instruktur Pelatihan/Staf Pelaksana

Suryani Yusuf, SE, MM : Fungsional Instruktur Muda  
 Lisnawati Z. Made, ST, MM : Analis Bahan Penyelenggaraan Program Pemagangan  
 Muh. Faqih, S.KM : Analis Bahan Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Instruktur dan Tenaga Pelatihan

**Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja**  
*Persentase fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui penciptaan / perluasan kesempatan kerja*

**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**  
 Kinerja : Meningkatnya Jumlah Kab./Kota yang telah Menyusun dokumen Perencanaan Tenaga Kerja  
 Indikator : *Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja*

**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**  
 Kinerja : Meningkatnya pencari kerja terdaftar yang difasilitasi penempatannya  
 Indikator : *Persentase pencari kerja terdaftar yang difasilitasi penempatannya*

Sasaran 2 RENSTRA NAKERTRANS 2021 – 2026 / ESS.II

IK PROG/ESS.III

IK KEG/ESS.IV

IK SUB KEG/ESS.IV

**Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**  
 Kinerja : Terfasilitasinya penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah  
 Indikator : *Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga kerja daerah yang telah disusun*

**Kegiatan Pelayanan antar kerja lintas daerah Kab./Kota**  
 Kinerja : Meningkatnya Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui pelayanan antar kerja lintas Kab./Kota  
 Indikator : *Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui pelayanan antar kerja lintas Kab./Kota*

**Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**  
 Kinerja : Terselenggaranya fasilitasi perijinan LPTKS  
 Indikator : *Jumlah LPTKS yang difasilitasi perijinannya*

**Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**  
 Kinerja : Meningkatnya Jumlah Pencari kerja yang difasilitasi penempatannya melalui informasi pasar kerja  
 Indikator : *Jumlah Pencari kerja yang difasilitasi penempatannya melalui informasi pasar kerja*

**Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi**  
 Kinerja : Terselenggaranya fasilitasi pelindungan Pekerja Migran (Pra dan Purna) penempatan  
 Indikator : *Jumlah Pekerja Migran (Pra dan Purna) penempatan yang mendapatkan fasilitasi pelindungan*

**Kegiatan Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**  
 Kinerja : Terlaksananya fasilitasi Perpanjangan RPTKA  
 Indikator : *Jumlah RPTKA perpanjangan yang di fasilitasi pengesahannya*

**Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**  
 Kinerja : Terselenggaranya fasilitasi perpanjangan Dokumen IMTA  
 Indikator : *Jumlah Dokumen IMTA yang difasilitasi perpanjangannya*

**Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro**  
 Kinerja : Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro  
 Indikator : *Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga kerja makro yang telah disusun*

**Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja**  
 Kinerja : Tersedianya SDM Pelayanan Antar Kerja (PengAntar Kerja dan Petugas Antar Kerja)  
 Indikator : *Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya*

**Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi**  
 Kinerja : Tersedianya Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi  
 Indikator : *Jumlah perizinan LPTKS yang Terintegrasi*

**Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online**  
 Kinerja : Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja Yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online  
 Indikator : *Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah*

**Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)**  
 Kinerja : Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)  
 Indikator : *Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya*

**Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**  
 Kinerja : Terlaksananya Pendataan TKA  
 Indikator : *Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA*

**Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**  
 Kinerja : Terlaksananya Koordinasi tentang perpanjangan IMTA  
 Indikator : *Jumlah laporan koordinasi tentang kebijakan dan strategi pengesahan IMTA yang dirumuskan*

**Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro**  
 Kinerja : Terlaksananya fasilitasi peningkatan SDM aparatur kab./kota dalam penyusunan rencana tenaga kerja daerah  
 Indikator : *Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro*

**Sub Kegiatan Pelayanan antar kerja**  
 Kinerja : Terwujudnya Pelayanan Antar Kerja  
 Indikator : *Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD*

**Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS**  
 Kinerja : Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LPTKS  
 Indikator : *Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku*

**Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online**  
 Kinerja : Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem Online (KarirHub)  
 Indikator : *Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)*

**Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik**  
 Kinerja : Terlaksananya Kegiatan yang dilakukan untuk verifikasi dan pemberian izin kepada cabang Perusahaan PMI secara Online  
 Indikator : *Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online*

**Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**  
 Kinerja : Terlaksananya Koordinasi tentang perpanjangan IMTA  
 Indikator : *Jumlah laporan koordinasi tentang kebijakan dan strategi pengesahan IMTA yang dirumuskan*

**Sub Kegiatan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)**  
 Kinerja : Terlaksananya Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)  
 Indikator : *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL*

**Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja**  
 Kinerja : Terlaksananya Job Fair Bursa Kerja  
 Indikator : *Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja*

**Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran**  
 Kinerja : Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran  
 Indikator : *Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA*

**Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan**  
 Kinerja : Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan  
 Indikator : *Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan*

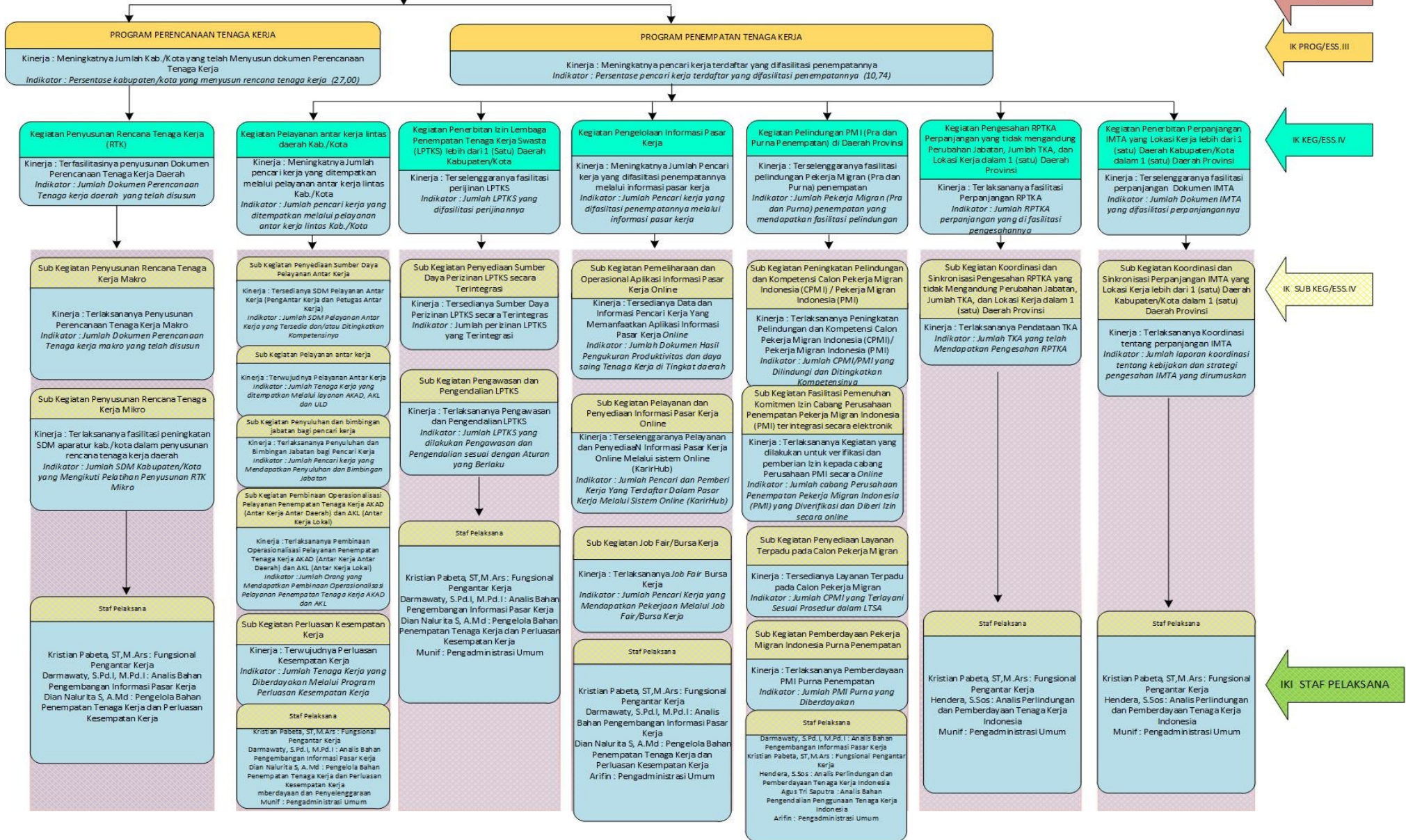
**Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja**  
 Kinerja : Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja  
 Indikator : *Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja*

**Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan**  
 Kinerja : Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan  
 Indikator : *Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan*



## CASCADING PENEMPATAN TENAGA KERJA

Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja  
*Persentase fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui penciptaan / perluasan kesempatan kerja (0,037)*



Sasaran 2 RENSTRA NAKERTRANS 2021 – 2026 / ESS. II

IK PROG/ESS.III

IK KEG/ESS.IV

IK SUB KEG/ESS.IV

IKI STAF PELAKSANA

Meningkatnya kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan lingkungan kerja  
*Persentase Pekerja/Buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan*

Sasaran 3 RENSTRA  
 NAKERTRANS 2021 – 2026 /  
 ESS. II

**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**  
 Kinerja : Meningkatnya Persentase perusahaan yang diawasi  
 Indikator : *Persentase jumlah perusahaan yang diawasi*

**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**  
 Kinerja : Meningkatnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama (PB)  
 Indikator : *Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama (PB)*

IK PROG/ESS.III

**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**  
 Kinerja : Meningkatnya Persentase perusahaan yang diawasi dan terdata dalam WLKP Online  
 Indikator : *Persentase perusahaan yang diawasi dari jumlah perusahaan dalam WLKP Online*

**Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota**  
 Kinerja : Meningkatnya Jumlah perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan (PP) yang disahkan dan perjanjian kerja bersama (PKB) yang telah didaftarkan  
 Indikator : *Jumlah perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan (PP) yang disahkan dan perjanjian kerja bersama (PKB) yang telah didaftarkan*

**Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(satu) Daerah Provinsi**  
 Kinerja : Meningkatnya peserta forum konsultasi / koordinasi antara pemerintah - serikat pekerja dan pengusaha yang dilaksanakan sebagai upaya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemogokan dan konflik lainnya  
 Indikator : *Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun*

**Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)**  
 Kinerja : Meningkatnya kesejahteraan upah kerja Pekerja  
 Indikator : *Persentase peningkatan kesejahteraan/upah kerja*

IK KEG/ESS.IV

**Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan**  
 Kinerja : Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan  
 Indikator : *Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)*

**Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial**  
 Kinerja : Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait Dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online  
 Indikator : *Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online*

**Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi**  
 Kinerja : Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi  
 Indikator : *Jumlah Perselisihan yang Dicegah*

**Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)**  
 Kinerja : Ditetapkannya Upah Minimum Provinsi (UMP)  
 Indikator : *Jumlah Penetapan UMP*

IK SUB KEG/ESS.IV

**Sub Kegiatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan**  
 Kinerja : Terlaksananya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan  
 Indikator : *Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan*

**Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial**  
 Kinerja : Terlaksananya Perjanjian Kerja Bersama yang Terkait Dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online  
 Indikator : *Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online*

**Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi**  
 Kinerja : Terelesaiannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi  
 Indikator : *Jumlah Perkara Perselisihan yang Terelesaikan*

**Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP)**  
 Kinerja : Ditetapkannya Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP)  
 Indikator : *Jumlah Penetapan UMSP*

**Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan**  
 Kinerja : Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan  
 Indikator : *Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3*

**Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**  
 Kinerja : Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek  
 Indikator : *Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek*

**Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi**  
 Kinerja : Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi  
 Indikator : *Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi Asosiasi*

**Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)**  
 Kinerja : Ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten (UMK)  
 Indikator : *Jumlah penetapan UMK*

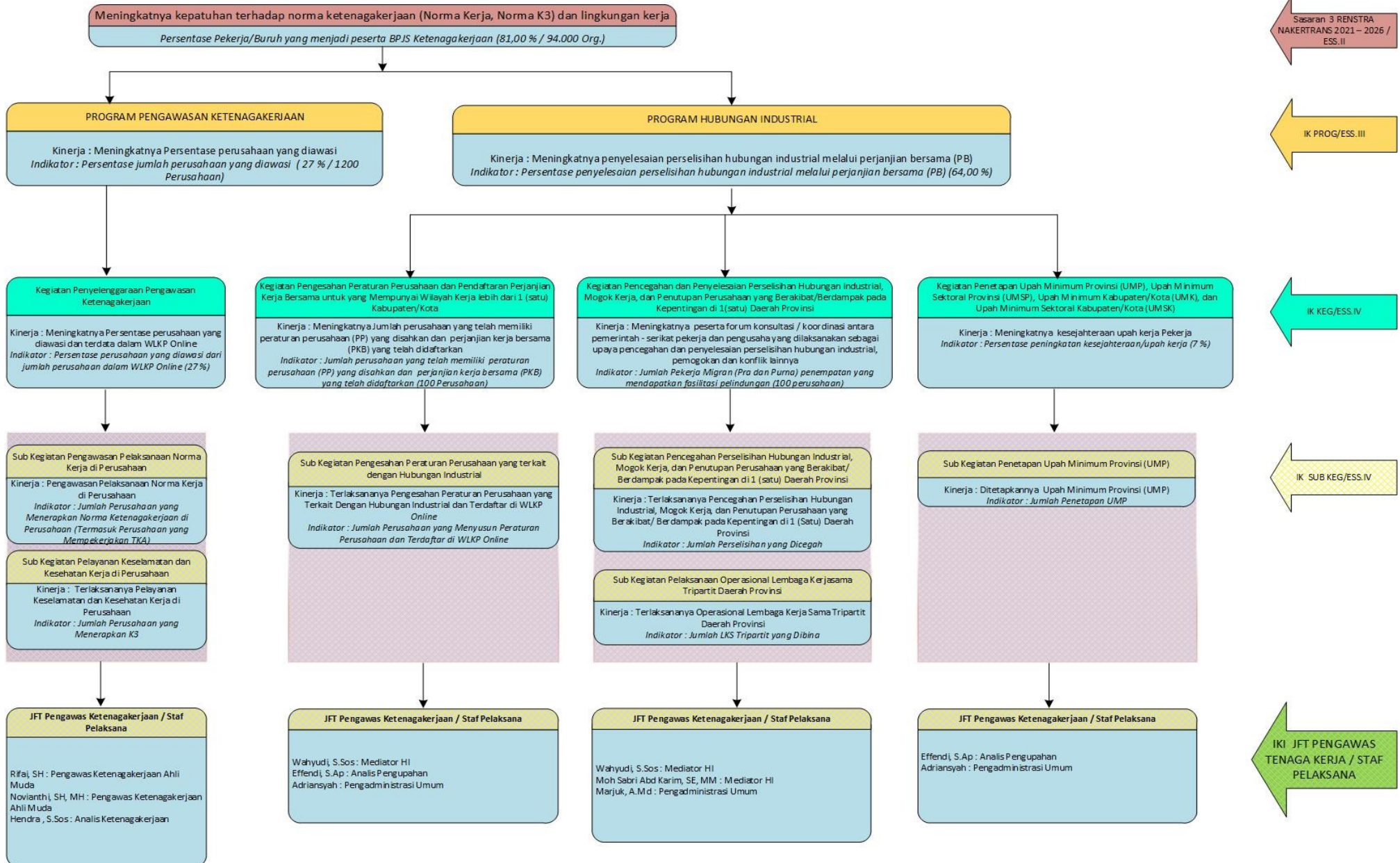
**Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi**  
 Kinerja : Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi  
 Indikator : *Jumlah LKS Tripartit yang Dibina*

**Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)**  
 Kinerja : Ditetapkannya Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK)  
 Indikator : *Jumlah penetapan UMSK*

**Sub Kegiatan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi**  
 Kinerja : Terlaksananya Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi  
 Indikator : *Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi*

**Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja**  
 Kinerja : Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja  
 Indikator : *Jumlah pekerja / buruh yang telah menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan*

# CASCADING BIDANG PHI - WASNAKER



**CASCADING KINERJA DISNAKERTRANS TERHADAP MISI 5 TUJUAN 1 SASARAN 1 RPJMD 2021 - 2026**  
**"Menjalankan pembangunan masyarakat dan wilayah yang merata dan berkeadilan"**

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih  
*Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah*

Mewujudkan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah Secara Merata dan Berkeadilan  
*Indeks Williamson*

Misi 5 RPJMD 2021 - 2026

Misi 5 ; Tujuan 1 RPJMD 2021 - 2026

Misi 5; Tujuan 1; Sasaran 1 RPJMD 2021 - 2026

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas  
*Nilai SAKIP Pemerintah Daerah*

Menurunnya Tingkat Ketimpangan Pendapatan  
*Indeks Gini*

Tujuan 3 RENSTRA NAKERTRANS 2021 – 2026 /ESS.II

Menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan warga unit pemukiman transmigrasi (UPT) Bina  
*Persentase Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) bina yang tingkat pendapatanarganya pada tahap pemantapan (50 %)*

Sasaran 1,2,3 RENSTRA NAKERTRANS 2021 – 2026 /ESS.II

Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah yang baik dan bersih  
*\* Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah*

Meningkatnya nilai pendapatan masyarakat unit pemukiman transmigrasi (UPT) Bina  
*Nilai rata rata pendapatan warga transmigrasi pada Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Bina (ekivalen Kg beras / KK tahun) (2.150)*

PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI  
*Persentase dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang tersusun*

PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI  
*Persentase satuan permukiman / kawasan transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya*

PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI  
*Persentase satuan permukiman yang berhasil dikembangkan pada kategori pemantapan*

IK PROG/ESS.III

Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi  
*Persentase kawasan / UPT bina transmigrasi yang difasilitasi sertifikasinya lahannya*

Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi  
*Jumlah penduduk yang ditata penyebarannya / ditempatkan dalam satu kawasan transmigrasi*

Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan  
*Jumlah satuan permukiman yang telah berada pada kategori pemantapan*

IK KEG/ESS.IV

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  
*Indeks Nilai Sakip Perangkat Daerah*  
*Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah*

IK PROG. /KEG.SEKRETARIAT PERANGKAT DAERAH

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
*Jumlah Laporan penatalaksanaan keuangan perangkat daerah*

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  
*Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah*

Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah  
*Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah / besaran rencana pendapatan daerah pada perangkat daerah*

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
*Jumlah laporan layanan administrasi dan ketatausahaan kepegawaian perangkat daerah*

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  
*Jumlah laporan layanan administrasi umum perangkat daerah*

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
*Jumlah pengadaan barang penunjang urusan pemerintah daerah*

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
*Jumlah laporan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan*

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang difasilitasi pemeliharaannya*

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
*Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*

**Meningkatnya nilai pendapatan masyarakat unit pemukiman transmigrasi (UPT) Bina**  
*Nilai rata rata pendapatan warga transmigrasi pada Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Bina (ekivalen Kg beras / KK tahun)*

Sasaran 4 RENSTRA  
NAKERTRANS 2021 – 2026 /ESS.II

**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**  
 Kinerja : Meningkatkan Persentase dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang tersusun  
 Indikator : *Persentase dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang tersusun*

**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**  
 Kinerja : Meningkatkan satuan permukiman / kawasan transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya  
 Indikator : *Persentase satuan permukiman / kawasan transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya*

**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**  
 Kinerja : Meningkatkan satuan permukiman yang berhasil dikembangkan pada kategori pemantapan  
 Indikator : *Persentase satuan permukiman yang berhasil dikembangkan pada kategori pemantapan*

IK PROG/ESS.III

**Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**  
 Kinerja : Meningkatkan Persentase kawasan / UPT bina transmigrasi yang difasilitasi sertifikasi lahannya  
 Indikator : *Persentase kawasan / UPT bina transmigrasi yang difasilitasi sertifikasi lahannya*

**Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**  
 Kinerja : Terselenggaranya penataan persebaran penduduk yang ditempatkan dalam satu kawasan transmigrasi  
 Indikator : *Jumlah penduduk yang ditata penyebarannya / ditempatkan dalam satu kawasan transmigrasi*

**Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan**  
 Kinerja : Meningkatkan Jumlah satuan permukiman yang telah berada pada kategori pemantapan  
 Indikator : *Jumlah satuan permukiman yang telah berada pada kategori pemantapan*

IK KEG/ESS.IV

**Sub Kegiatan Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi**  
 Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjakamkan dengan Daerah Lain

**Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**  
 Kinerja : Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi  
 Indikator : *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi*

**Sub Kegiatan Verifikasi Hasil Penajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota**  
 Kinerja : Terlaksananya Verifikasi Hasil Penajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota  
 Indikator : *Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Verifikasi Hasil Penajakan*

**Sub Kegiatan Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman**  
 Kinerja : Terwujudnya Penguatan SDM dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman  
 Indikator : *Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina*

IK SUB KEG/ESS.IV

**Sub Kegiatan Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan**  
 Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi

**Sub Kegiatan Penyajian Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran**  
 Kinerja : Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran yang Telah Disiapkan  
 Indikator : *Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)*

**Sub Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Dan OPD Tingkat Kabupaten/ Kota**  
 Kinerja : Terlaksananya Penyuluhan dan Sosialisasi Calon Transmigran Penduduk Asal dan OPD Tingkat Kabupaten/ Kota  
 Indikator : *Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal dan OPD Tingkat Kabupaten yang Mendapatkan Penyuluhan dan Sosialisasi*

**Sub Kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman**  
 Kinerja : Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman  
 Indikator : *Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan*

**Sub Kegiatan Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi**  
 Kinerja : Terlaksananya Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi  
 Indikator : *Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)*

**Sub Kegiatan Fasilitasi dan Pelatihan Calon Transmigran (Wawasan Kebangsaan dan Karakter Lokasi Daerah Tujuan)**  
 Kinerja : Terselenggaranya Fasilitasi dan Pelatihan Calon Transmigran  
 Indikator : *Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan*

**Sub Kegiatan Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi**  
 Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi

**Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi**  
 Kinerja : Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi  
 Indikator : *Jumlah Transmigran yang Ditempatkan*

**Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Transmigran**  
 Kinerja : Terlaksananya Layanan Kesehatan Transmigran  
 Indikator : *Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran*

**Sub Kegiatan Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai Ke Lokasi**  
 Kinerja : Terlaksananya Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai ke Lokasi  
 Indikator : *Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai ke Lokasi*

**Sub Kegiatan Bantuan Non- Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)**  
 Kinerja : Terlaksananya Pemberian Bantuan Non- Standar Transmigrasi  
 Indikator : *Jumlah Bantuan Non- Standar yang Diberikan kepada Transmigran*

**Sub Kegiatan Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**  
 Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi

**Sub Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi**  
 Kinerja : Terlaksananya Penyuluhan Transmigrasi  
 Indikator : *Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan*

**Sub Kegiatan Pelatihan Transmigrasi**  
 Kinerja : Terselenggaranya Pelatihan Transmigrasi  
 Indikator : *Jumlah Calon Transmigran/ Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan*

**Sub Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi**  
 Kinerja : Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi  
 Indikator : *Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi*

**Sub Kegiatan Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi**  
 Kinerja : Terlaksananya Penyesuaian Transmigran di Lingkungan yang Baru pada Satuan Permukiman Transmigrasi  
 Indikator : *Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi*

## CASCADING BIDANG PKT

Meningkatnya nilai pendapatan masyarakat unit pemukiman transmigrasi (UPT) Bina  
*Nilai rata rata pendapatan warga transmigrasi pada Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Bina (ekivalen Kg beras / KK tahun) (2150)*

← Sasaran 4 RENSTRA NAKERTRANS 2021 – 2026 /ESS.II

**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**  
 Kinerja : Meningkatkan Persentase dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang tersusun  
 Indikator : *Persentase dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang tersusun (70,00)*

← IK PROG/ESS.III

**Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**  
 Kinerja : Meningkatkan Persentase kawasan / UPT bina transmigrasi yang difasilitasi sertifikasi lahannya  
 Indikator : *Persentase kawasan / UPT bina transmigrasi yang difasilitasi sertifikasi lahannya (4)*

← IK KEG/ESS.IV

**Sub Kegiatan Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi**  
 Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjakamkan dengan Daerah Lain

**Sub Kegiatan Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan**  
 Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi

**Sub Kegiatan Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi**  
 Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi

**Sub Kegiatan Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**  
 Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi

← IK SUB. KEG/ESS.IV / JFT (PSM)

**Staf Pelaksana**  
 Ramlah , Nur afni , Taufan , Nasib : Penyusun Laporan identifikasi Potensi Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, 13 Laporan)

**Staf Pelaksana**  
 Ramlah , Nur afni , Taufan , Nasib : Penyusunan laporan hasil musyawarah Transmigrasi . (13 Laporan)

**Staf Pelaksana**  
 Ramlah , Nur afni , Taufan , Nasib : Penyusun Laporan Jumlah Luas Sisa Daya Tampung (SDT) untuk perencanaan pembangunan RTJK (2 Laporan)

**Staf Pelaksana**  
 Ramlah , Nur afni , Taufan , Nasib : Penyusun Data Dokumen Jumlah Pencadangan Tanah (2 Laporan).

← IKI STAF PELAKSANA

## CASCADING BIDANG PKTP3

Meningkatnya nilai pendapatan masyarakat unit pemukiman transmigrasi (UPT) Bina  
*Nilai rata rata pendapatan warga transmigrasi pada Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Bina (ekivalen Kg beras / KK tahun) (2150)*

← Sasaran 4 RENSTRA NAKERTRANS 2021 – 2026 /ESS.II

**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**  
 Kinerja : Meningkatnya satuan permukiman / kawasan transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya  
 Indikator : Persentase satuan permukiman / kawasan transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya (50,00)

← IK PROG/ESS.III

**Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**  
 Kinerja : Terselenggaranya penataan persebaran penduduk yang ditempatkan dalam satu kawasan transmigrasi  
 Indikator : Jumlah penduduk yang ditata penyebarannya / ditempatkan dalam satu kawasan transmigrasi (200)

← IK KEG/ESS.IV

**Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**  
 Kinerja : Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi  
 Indikator : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (1 Laporan)

**Sub Kegiatan Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran**  
 Kinerja : Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran yang Telah Disiapkan  
 Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang) (30 Dokumen)

**Sub Kegiatan Pindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi**  
 Kinerja : Terlaksananya Pindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi  
 Indikator : Jumlah Transmigran yang Ditempatkan (20 KK)

**Sub Kegiatan Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi**  
 Kinerja : Terlaksananya Penyesuaian Transmigran di Lingkungan yang Baru pada Satuan Permukiman Transmigrasi  
 Indikator : Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi (20 KK)

← IK SUB. KEG/ESS.IV / JFT (PSM)

**Staf Pelaksana**

Muh Husni, ST.,MM, Amirudin Djuhaepa, ST, Fanti, SH.,; Penyusun Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi , 1 Laporan).

**Staf Pelaksana**

Muh Husni, ST.,MM, Amirudin Djuhaepa, ST, Fanti, SH., : Penyusun Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang), 30 Dokumen).

**Staf Pelaksana**

Husni Belani, S.Sos. Ridwan., Irfan : Penyusun Dokumen Jumlah Transmigran yang Ditempatkan, 2 Laporan).

**Staf Pelaksana**

Husni Belani, S.Sos. Ridwan., Irfan : Penyusun Data Dokumen Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi, 2 Laporan).

← IKI STAF PELAKSANA

# CASCADING BIDANG PKTDT

Meningkatnya nilai pendapatan masyarakat unit pemukiman transmigrasi (UPT) Bina  
 Nilai rata rata pendapatan warga transmigrasi pada Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Bina (ekivalen Kg beras / KK tahun) (2150)

Sasaran 4 RENSTRA NAKERTRANS 2021 – 2026 /ESS.II

## PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

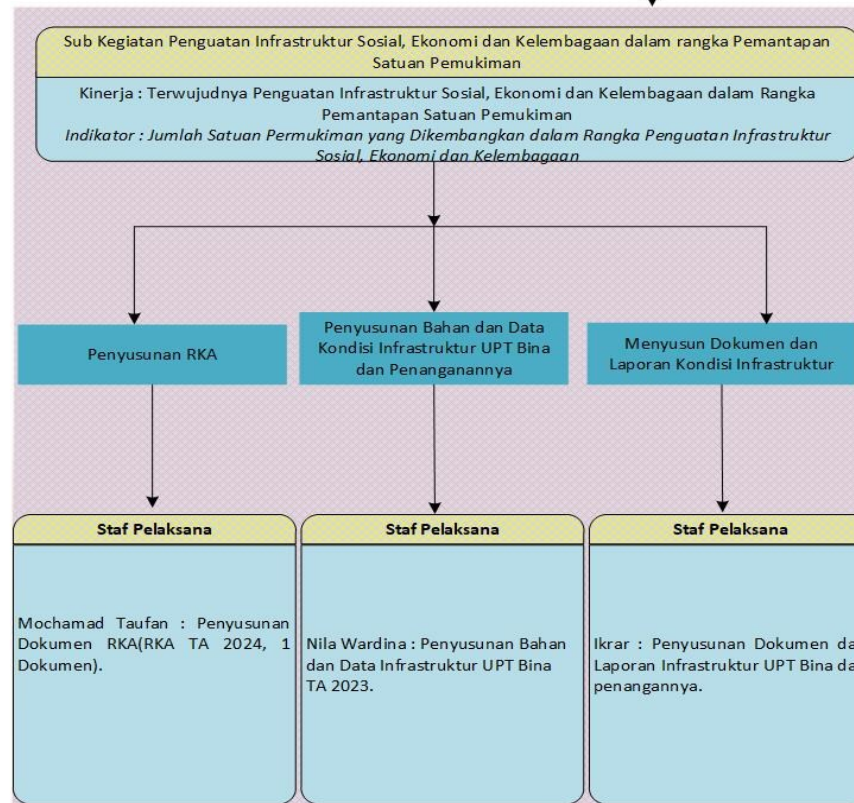
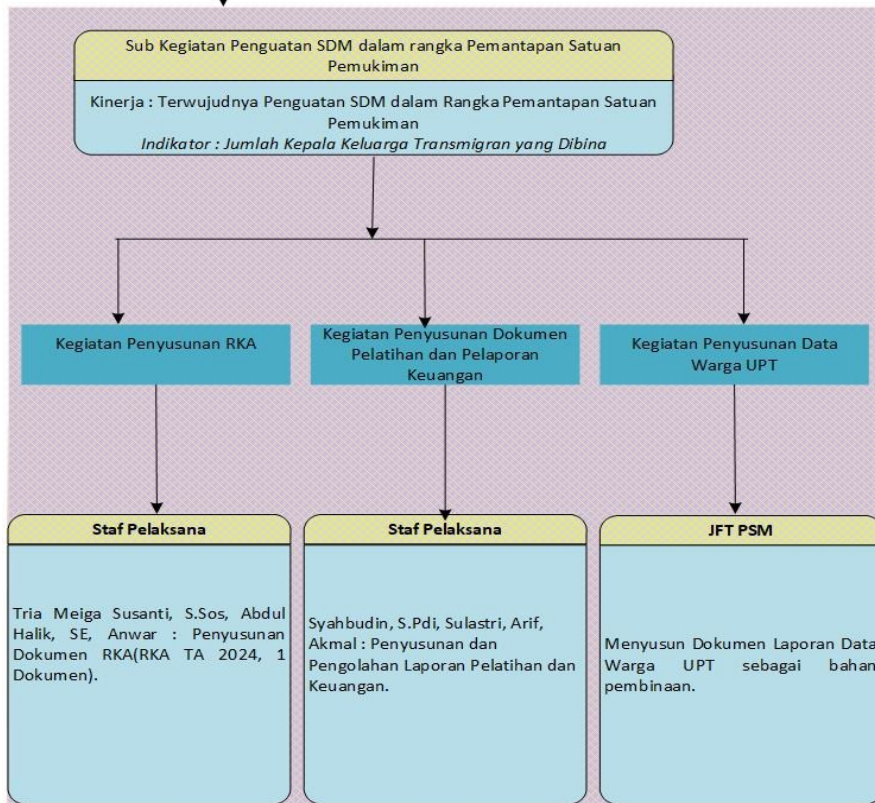
Kinerja : Meningkatnya satuan permukiman yang berhasil dikembangkan pada kategori pemantapan  
 Indikator : Persentase satuan permukiman yang berhasil dikembangkan pada kategori pemantapan (50,00 )

IK PROG/ESS.III

## Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan

Kinerja : Meningkatnya Jumlah satuan permukiman yang telah berada pada kategori pemantapan  
 Indikator : Jumlah satuan permukiman yang telah berada pada kategori pemantapan (3)

IK KEG/ESS.IV



IK SUB. KEG/ESS.IV / JFT (PSM)

IKI STAF PELAKSANA





